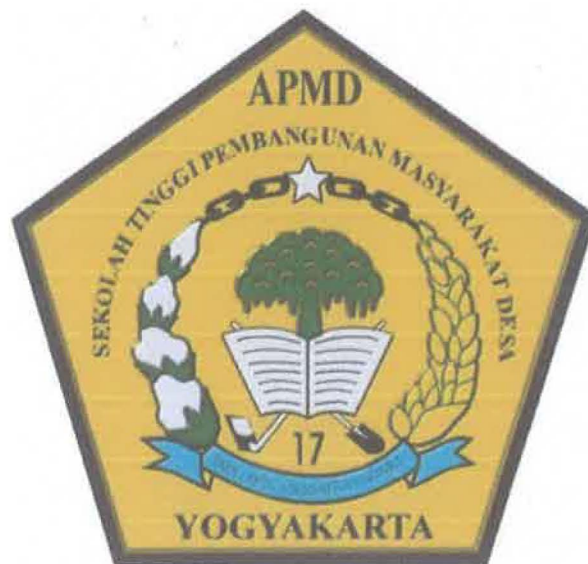


**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK NAGARI  
(Studi di Nagari Taram Kecamatan Harau Lima Puluh Kota Provinsi  
Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**Martiw Azzarah Putri**

**20520011**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2025**



**HALAMAN JUDUL**

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA**

**MILIK NAGARI**

**(Studi di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Provinsi Sumatera Barat)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sastra (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada :

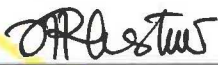


Hari : Jumat

Tanggal : 14 Februari 2025

Waktu : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Utami Sulistiana, S.P., M.P	
Ketua Penguji/Pembimbing	
Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat	
Penguji Samping I	
Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A	
Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martiwi Azzarah Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 20520011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)” adalah benar-benar hasil kerja dan karya saya sendiri, serta seluruh sumber yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apa bila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Martiwi Azzarah Putri  
20520011

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Martiwi Azzarah Putri  
NIM : 20520011  
Telp : 082391516864  
Email : [tiwiazarah@gmail.com](mailto:tiwiazarah@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**" Collaborative Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)".**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

  
nyataan  
MARTIWI AZZARAH PUTRI  
20520011

## MOTTO

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal,  
Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan  
menjadi alasan untuk menyerah, setiap  
orang memiliki proses yang berbeda.  
*Percaya Proses* itu yang paling penting ,  
Karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik  
di balik Kata Proses yang kamu anggap  
Rumit”

(Edwar Satria)

Orang lain ngga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita, yang mereka  
ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun  
tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga  
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Prosesnya memang tidak mudah tapi endingnya bikin untuk ngga berhenti bilang  
Alhamdulillah

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Kakek dan Almh Nenek saya yang tercinta, terima kasih kepada kakek Darwis dan Nenek Kasmawati (Almh), yang sudah merawat, membesarkan, dan membiayai saya sampai sekarang ini. Walaupun nenek tidak bisa mendampingi saya hingga menyelesaikan studinya di bangku perkuliahan dan meraih gelar sarjana, saya sangat yakin nenek dapat merasakan kebahagiaan juga.
3. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada ibu Resi Novriati dan bapak Hengki. Terima kasih atas semua bentuk dukungan yang diberikan kepada saya, terutama atas doa-doa yang telah diberikan, tentu saya tidak akan bisa membalas semua jasa yang telah orang tua saya berikan.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada paman-paman saya, terima kasih kepada paman Alex Strio Febri, Roy Marten, Roni Ifni nasif, dan Zailendra. Terima kasih atas semua suport dan doa-doa yang diberikan kepada peneliti selama ini.
5. Terima kasih kepada kakak laki-laki dan adik-adik perempuan saya, Ari Mahatta Putra yang sering mendukung peneliti dari berbagai aspek dan sering memberikan uang kepada saya. Adik saya Sabila Azahra Putri dan Saskia Dwi Putri yang selalu menjadi tempat keluh kesah saya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang *collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam pengetahuan serta wawasan dalam berpikir dan menulis. Maka dari itu apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Peneliti juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak dapat menyelesaikan sendiri, untuk itu dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat sebagai dosen penguji samping I (satu) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P, M.P.A sebagai dosen penguji sampung II (dua) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan di STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Bapak/Ibu Dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Nagari Taram, pengelola Badan Usaha Milik Nagari, dan masyarakat Nagari Taram yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Martiwi Azzarah Putri  
20520011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Literatur Review .....	7
G. Kerangka Konseptual.....	10
1. <i>Governance</i> .....	10
2. <i>Collaborative Governance</i> .....	12
3. Badan Usaha Milik Nagari.....	14
H. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>PROFIL NAGARI TARAM.....</b>	<b>21</b>
A. Sejarah Nagari Taram .....	21
B. Visi dan Misi.....	27
C. Keadaan Geografis.....	28
D. Keadaan Demografis.....	30

E. Keadaan Ekonomi .....	36
F. Keadaan Sosial Budaya.....	37
G. Keadaan Sosial.....	37
H. Kondisi Pemerintahan Nagari .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Relasi dalam Pengelolaan BUMNag .....	47
B. Interaksi Antara Pemerintah Nagari dan BUMNag .....	57
C. Faktor-faktor yang penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMNag .....	61
1. Faktor Pendukung .....	62
2. Faktor Penghambat .....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
1. Kesimpulan .....	68
2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Informan .....	17
Tabel 2 : Nama-nama Kepala Nagari atau Wali Nagari dari tahun 1901 s/d Sekarang.....	26
Tabel 3 : Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaanya.....	29
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	33
Tabel 5 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan .....	34
Tabel 6 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	35
Tabel 7 : Sarana dan Prasarana Ibadah .....	38
Tabel 8 : Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	38
Tabel 9 : Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	39
Tabel 10 : Sarana dan Prasarana Olahraga .....	39
Tabel 11: Pembagian Jorong di Nagari Taram .....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin.....	31
Gambar 2 Jumlah Kepala Keluarga (KK).....	32
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Taram .....	42

## INTISARI

*Collaborative Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Topik ini dipilih karena terdapat Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah nagari. Dengan melakukan pelatihan bagi aparat pemerintah mengenai pengelolaan BUMNag dan pentingnya kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah nagari dan dukungannya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif *ekploratif* dengan teknik *purposive* untuk memperoleh informasi mendalam dari sejumlah informan yang relevan, seperti pemerintah nagari, pengelola BUMNag, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi nagari. Data di peroleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi relasi dan interaksi antara pemerintah nagari dan BUMNag, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan BUMNag, tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak, serta peluang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja BUMNag di Nagari Taram.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa relasi dalam pengelolaan BUMNag di nagari taram melalui proses musyawarah berjalan dengan baik. Mekanisme komunikasi antara pengelola BUMNag dan stakeholder lainnya dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, laporan berkala, dan forum diskusi. Interaksi antara pemerintah nagari dan pengelola BUMNag tergolong baik, adanya dukungan dari pemerintah nagari dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan bimbingan teknis. Adanya faktor pendukung yaitu dari komitmen pemerintah nagari dan partisipasi aktif masyarakat, dan faktor penghambat sumber daya manusia dan faktor anggaran. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan *collaborative governance* dalam pengelolaan BUMNag di daerah lainnya, khususnya di wilayah pedesaan yang mengandalkan kearifan lokal dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Nagari

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah untuk memaksimalkan terselenggaranya fungsi pemerintah bagi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlaksana. Namun ada beberapa bidang yang bisa menjadi landasan agar kehidupan sosial di Indonesia dapat berfungsi secara aktif dan efektif. Seiring berjalannya waktu, peran pemerintah dalam masyarakat telah menjadi sebuah kewajiban nyata dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perekonomian. Perekonomian merupakan bidang penting yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam pengelolaannya untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, tidak serta merta terjadi sendiri, memerlukan pengaruh pengetahuan yang mungkin memberikan kemudahan dan daya tahan yang kuat.

Salah satu ilmu yang mampu menggerakkan roda perekonomian saat ini adalah *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana mempunyai arti kolaborasi atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari individu atau mandiri, kelompok, dan organisasi (Jhon Wana. 2018). Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama Frame, Tanis M., Thomas Gunton dan J, (2015). Tata kelola kolaboratif adalah proses yang melibatkan berbagai aktor dari terlibat dalam pengembangan kebijakan publik dan bentuk pemerintahan masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah berbagai pihak yang independen untuk mengidentifikasi tujuan bersama dalam masalah atau potensi yang dimiliki hingga di suatu wilayah Mc Guire, (2016).

Dalam mendukung tata kelola ditingkat lokal, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membawa angin segar bagi pembangunan dan kemandirian desa. Daerah menyambut baik dengan disahkannya Undang-Undang tersebut termasuk Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung menyambut baik diberlakukannya undang-undang desa tersebut. Indonesia mempunyai tingkat keberagaman pemerintahan yang paling rendah. Setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda dengan pemerintahan terendah. Diantaranya, di Jawa Barat disebut Desa, di Yogyakarta disebut Kalurahan, di Bali disebut banjar, di Madura disebut klebun, di Kalimantan Selatan disebut pembakal, di Aceh disebut gampong, di Maluku disebut Negeri, dan di Sumatera Barat disebut Nagari dan masih banyak daerah lain di Indonesia.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan pasca reformasi tahun 1999, di mana pemerintahan tingkat terendah sebelumnya disebut desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Namun setelah adanya reformasi yang bertujuan untuk menjaga adat istiadat, budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat, maka pemerintahan desa berganti nama menjadi Nagari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespon dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengembalian Nagari, yang kemudian pada tahun 2007 disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Dengan adanya undang-undang desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang istilah Nagari mempunyai arti yang sama dengan desa di Pulau Jawa. Perubahan nama ini berdampak pada berkurangnya jumlah pemerintah terendah di Provinsi Sumatera Barat.



Salah satu manfaat yang dapat diterima oleh pemerintah Nagari di Sumatera Barat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa masyarakat Nagari mempunyai hak dan kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa/Nagari. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, di Sumatera Barat disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Salah satu Kabupaten yang memiliki BUMNag yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. BUMNAG ini dikelola oleh pemerintah Nagari dan masyarakat setempat. BUMNag ini juga memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik nagari untuk mengabdikan dan bekerja dalam pengelolaan usaha milik Nagari. Menjadi kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, serta dapat menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada potensi lokal merupakan cara kerja BUMNag agar tetap tumbuh dan berkembang hingga memberikan kontribusi bagi pendapatan desa atau Nagari (Zulkarnaen, 2016).

Keberadaan BUMNag ini terletak Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Taram merupakan Nagari yang salah satu pilot project Nagari Adat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ada dua pertimbangan ditetapkannya Nagari Taram yaitu, yang pertama secara teritorial, Nagari Taram belum mengalami pemekaran Nagari artinya merupakan wilayah kesatuan dari masyarakat hukum adat di mana diantaranya diwakili oleh pemerintahan adat. Nagari tetap sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, di mana diwakili oleh pemerintahan Nagari. Yang kedua dari sudut pandang masyarakat-budaya, keberadaan dan peran tokoh adat (ninik mamak) dan tokoh agama (ulama) masih cukup kuat dalam kehidupan bermasyarakat, terutama mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari.

BUMNag ini bernama *Sato Sakaki* yang didirikan pada tahun 2017, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Nagari yang lebih cepat berdiri dibandingkan dengan yang lain. Pengelolaan BUMNag yang tepat dapat menghasilkan perekonomian desa yang stabil dan berkelanjutan, memudahkan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar dan umum masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Adanya fasilitas umum, sarana, dan prasarana akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan, tempat ibadah, pusat pelatihan, fasilitas olahraga, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini dapat terwujud jika desa memiliki dana yang cukup, salah satunya berasal dari keuntungan usaha BUMNag.

Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengembangkan usaha dalam bentuk distribusi gas LPG serta melakukan investasi di pertashop milik PT Tiara Fajar Semesta. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari dan memenuhi kebutuhan gas serta bahan bakar masyarakat. Untuk itu, Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki menyediakan distribusi gas LPG yang berlokasi di Jorong Subarang, Taram, Kecamatan Harau, serta pertashop resmi Pertamina yang terletak di Jorong Tanjung Kumbang, Jalan Lintas Taram-Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan BUMNag adalah melalui kolaborasi antara pemerintah nagari dan BUMNag itu sendiri. Konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, interaksi antara pemerintah nagari dan BUMNag menjadi sangat penting, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi program-program yang mendukung

pengembangan ekonomi desa. Peran BUMNag tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga mencari keuntungan untuk menutupi biaya operasional usaha dan menyetorkan uang ke kas Nagari. Masyarakat/pelaku usaha berperan dalam mendukung dan membimbing serta mengawasi secara tidak langsung Bumrag sehingga Bumrag dapat memberi manfaat bagi masyarakat Nagari.

Di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pengelolaan BUMNag menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor penghambat antara lain kurangnya sumber daya manusia yang terampil, minimnya dukungan finansial, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya BUMNag. Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung yang dapat memperkuat pengelolaan BUMNag, seperti adanya dukungan dari pemerintah nagari, partisipasi aktif masyarakat, dan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah nagari dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Taram, serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah nagari dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan memahami relasi pengelolaan BUMNag, interaksi antara pemerintah nagari dan BUMNag, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMNag, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja BUMNag. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah nagari dan pengelola BUMNag dalam meningkatkan kolaborasi dan efektivitas pengelolaan BUMNag, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan model tata kelola kolaboratif yang lebih baik di tingkat nagari.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kolaborasi governance dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari/desa di tuangkan dalam judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan

Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu:

1. Relasi dalam Pengelolaan BUMNag
2. Interaksi Antara Pemerintah Nagari dan BUMNag
3. Faktor-Faktor yang pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peran pemerintah nagari dan dukungannya dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademis secara komprehensif mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan badan usaha milik nagari yang ada di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan informasi sekaligus saran dan rujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *collaborative governance* dibidang pengelolaan badan usaha milik Nagari. Dan untuk menambah wawasan masyarakat.

## F. Literatur Review

Penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang sudah berupaya mengungkapkan tentang kollaborasi governance dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari adalah sebagai berikut:

Pertama, Journal Of Indonesian Publik Administration and Governance Studies (JIPAGS), yang dilakukan oleh Vindi Octaviani, yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Octaviani, (2022) menjelaskan tentang keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat mempengaruhi perkembangan BUMDes. Kondisi sumber daya alam yang melimpah mendukung BUMDes dari segi sumber daya alam namun tetap memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak hanya mampu mengelola BUMDes

tetapi juga dapat mengembangkan dan membawa BUMDes mampu mengatasi berbagai permasalahan.

Kedua, Jurnal Ilmu Administrasi, yang dilakukan oleh Muhammad Nur Afandi dan Salwa Rizki Aulia, yang berjudul Penguatan Pengelolaan BUMDES Harta Sadesa di Desa Katapang Kabupaten Bandung melalui Model Collaborative, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2022, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Afandi & Aulia, (2022) menjelaskan tentang pengelolaan BUMDes Harta Sadesa melalui kolaborasi belum efektif karena kerjasama antar pemangku kepentingan masih lemah. Lima hambatan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan manajemen strategik, pemasaran, proses produksi, sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai hambatan tersebut dijawab dengan satu upaya untuk meningkatkan prinsip kooperatif (kerjasama) yakni melalui perancangan model *collaborative governance* melalui tiga tahapan, diantaranya identifikasi hambatan dan peluang (fase mendengarkan), strategi debat untuk mempengaruhi (fase dialog) dan merencanakan aksi kolaborasi (fase pilihan). Dalam tahap kedua ditambahkan pula skema kolaborasi yakni *hexa helix* (kolaborasi yang melibatkan enam pemangku kepentingan).

Ketiga, Jurnal Of Governance Innovation, yang dilakukan oleh Tia Subekti, Irma Fitriana Ulfah, yang berjudul Collaborative Governance pada BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subekti & Irma Fitriana Ulfah (2023) menjelaskan tentang *collaborative governance* merupakan alternatif yang tepat untuk dipilih dalam pengelolaan Bumdes. Kolaborasi mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan bumdes yang kebanyakan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya. Keberhasilan proses kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni *political will* dari pemerintah, desaian kelembagaan yang baik, transparansi pengelolaan bumdes dengan membentuk

badan pengawas dari masyarakat, serta kepercayaan publik yang tinggi yang mendorong partisipasi masyarakat.

Keempat, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, yang dilakukan oleh Rieke Dwi Phitaloka, Sri Wibawani, yang berjudul Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dwi Phitaloka & Sri Wibawani, (2023) menjelaskan tentang collaborative governance BUM Desa belum berhasil dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa Sugihwaras. Faktor utama yang menghambat yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUM Desa “Sukses Bersama” masih rendah dan membutuhkan pelatihan mengenai strategi marketing untuk mempromosikan produk-produk yang dimiliki. Serta agar mampu meningkatkan penghasilan sehingga bisa menyumbangkan penghasilan tersebut untuk pendapatan asli desa.

Kelima, Journal of Economics and Business, yang dilakukan oleh Silsabila, Nurul Fauzi, Irda Rosit, yang berjudul Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota, Volume 8, Nomor 1 Tahun 2024, Penelitian Ini menggunakan paradigma penelitian yaitu kualitatif interpretif dengan metode penelitian yaitu studi kasus. Silsabila et al., (2024), menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari dengan pelaporan keuangan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai pada peraturan berlaku yang dilakukan setiap satu kali enam bulan kepada Pemerintah Nagari Taram dan setiap satu kali setahun melalui musyawarah nagari. Pelaksanaan prinsip responsibilitas dilakukan dengan mengupayakan menjual gas LPG lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan pertashop serta tidak membangun usaha yang sama dengan yang

dijalankan oleh masyarakat. Prinsip independensi dibuktikan dengan tidak adanya intervensi dari pihak lain dalam pengelolaan BUMNag hanya saja dalam hal sistem pembagian kerja tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian diatas yaitu penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari dengan membangun relasi bersama *stakeholder* yang memiliki tujuan yang sama. Penelitian terdahulu juga menjelaskan tingkat keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan badan usaha milik desa/Nagari. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu, pertama metode yang di gunakan peneltian ini menggunakan metode kualitatif *eksploratif*. Kedua, terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian ini lebih berfokus pada relasi dalam pengeloaan BUMNag, interaksi antara pemerintah nagari dan bumnag, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan bumnag di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

## **G. Kerangka Konseptual**

### *1. Governance*

Kata *governance* seyogyanya berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai *gubernare*, kemudian kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yakni *govern* yang dimaknai dengan *steer*, *direct*, dan *rul*. Kata *governance* sering dipahami sebagai pengendalian kekuasaan yang melibatkan komunitas sosial dan tidak lagi menjadi monopoli kekuasaan negara. Pengendalian kekuasaan yang melibatkan berbagai *stakeholder* dalam menyelesaikan masalah publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan pemerintah saat ini. Mengingat *governance* ialah sebuah



proses interaksi berbagai stakeholder yang meliputi negara, masyarakat, dan bisnis dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik Basuki, (2018).

Adapun Wibawa, (2014) memberikan penjelasan tentang *governance*, yang menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh pemerintah dan institusi lain, seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara. Hal demikian sejalan dengan yang dikemukakan Dwiyanto (2018) bahwa keterlibatan banyak organisasi dan aktor dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menanggapi persoalan publik merupakan penekanan utama dari studi *governance*. Dengan hal tersebut dapat digambarkan bahwa keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam mengatur, mengurus urusan, dan kepentingan publik merupakan konsep kunci dari penekanan studi *governance*.

Dalam konteks politik, *governance* tidak hanya sekedar aktivitas pemerintah, akan tetapi juga mencakup kegiatan di luar pemerintah Sumaryadi, (2016). Sementara pada konteks pemerintahan, konsep *governance* seringkali disamakan dengan *government* Rahman & Tarigan, (2020), yakni pelaksanaan kewenangan (*authority*) pada pengaturan aspek-aspek sosial dari perilaku warga negara. Dari berbagai konteks dan dasar keilmuan yang dijadikan landasan dalam pengkajiannya, *governance* telah memunculkan beragam pendefinisian yang saling berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan keterlibatan tiga (3) yaitu sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang dalam prosesnya menghasilkan kebijakan untuk mengelola dan mengatasi permasalahan publik. Tentunya dengan hal tersebut dapat digambarkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder dalam mengatur, mengurus urusan, dan

kepentingan publik merupakan konsep kunci dari penekanan studi *governance* sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan bersama.

## 2. *Collaborative Governance*

Menguatnya konsep kolaborasi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah publik, tidak lepas dari adanya kebutuhan pengetahuan serta kelembagaan yang semakin spesifik dan kompleks Plotnikof, (2015). Kolaborasi menjadi suatu alternatif bagi setiap personal atau organisasi untuk saling berpartisipasi dengan berbagi sumber daya, informasi, pengetahuan, serta aktivitas dalam merumuskan sebuah keputusan secara bersama-sama.

Secara praktis, pemerintahan kolaboratif terdiri dari sebuah forum yang resmi di mana sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang sama berkumpul untuk berbicara, berdiskusi, dan bahkan mendiskusikan suatu masalah untuk menghasilkan alternatif keputusan yang bermanfaat Scott & Thomas, (2017), bahkan hingga pada kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Amsler, (2016). Sebagai penyelenggara (convner) forum bersama pemerintah harus memastikan bahwa pemangku kepentingan ini benar-benar menjadi bagian dari jaringan kebijakan pemerintah Scott, (2016). Menurut Emerson dan Nabatchi (2018), proses kolaborasi adalah siklus interaksi oriteratif yang menunjukkan bahwa ketika kerja sama dilakukan dengan cara yang begitu siklus dan dinamis dapat menghasilkan berbagai tindakan dan efek sementara sebelum mencapai efek yang paling penting.

Menurut Gash, *Collaborative governance* sebagai strategi peraturan pemerintahan dan sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsesus, dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program

atau aset publik. *Collaborative governance* adalah salah satu model interaksi aktor stakeholder.

*Collaborative Governance* merupakan konsep dalam suatu manajemen pemerintahan yang dijadikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Menurut *Ansell dan Gash* (dalam Syaeful Islamy 2018), *Collaborative Governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan ada pembagian peran serta bertujuan untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program pemerintah. Sejalan dengan itu Puspitasari et al., (2022) menjelaskan bahwa relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera telah tersistem dan terpola dengan baik sebagai perwujudan dari perspektif governance.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan hubungan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau bekerja sama untuk membuat solusi dalam situasi di mana orang atau organisasi menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan ruang. Sedangkan *collaborative governance* merupakan struktur jejaring multi organisasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat yang membuat kesepakatan bersama melalui interaksi formal maupun informal, serta adanya pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini kolaborasi atau kerja sama antara pemerintahan, swasta, dan

pelaku usaha dalam pengelolaan badan usaha milik nagari. *Governance* didefinisikan sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya. Dalam konteks pengelolaan badan usaha milik nagari, *collaborative governance* dapat membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil melibatkan input dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pemilik bisnis itu sendiri. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan dan praktik pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan kemajuan perusahaan Nagari sehingga perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

### 3. Badan Usaha Milik Nagari

Menurut Peraturan Nagari Taram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari yang disingkat dengan BUMNag "Sato Sakaki", merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif nagari secara kooperatif, transparan, dan agrobisnis. Dengan adanya Pembentukan BUMNag, diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha yang ada di masyarakat.

Menurut (Zulkarnaen, 2016), bumnag menjadi kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, serta dapat menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada potensi lokal merupakan cara kerja BUMNag agar tetap tumbuh dan berkembang hingga memberikan kontribusi bagi pendapatan desa atau Nagari. Risa et al., (2019) menjelaskan bahwa badan usaha milik Nagari merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintahan Nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan Nagari dan masyarakat. BUMNag merupakan pilar perekonomian Nagari yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada

kepentingan masyarakat. BUMNag juga merupakan bentuk suatu usaha yang dilakukan oleh Nagari untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Nagari.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah Nagari dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian Nagari dan bumnag ini dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan Nagari.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *eksploratif* karena sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yaitu pengelolaan BUMNag . Dimana badan usaha milik Nagari ini belum familiar dikalangan masyarakat secara umum khususnya di Indonesia. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Sesuai dengan yang dijelaskan Creswell (2014) penelitian kualitatif eksploratif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial atau kemanusiaan dan yang dijelaskan Ardiansyah & Aulia, (2021) Penelitian eksploratif merupakan sebuah penelitian yang ingin mengali sesuatu hal yang baru yang belum banyak di ketahui oleh khalayak sehingga ingin dikaji lebih dalam, bisanya menyangkut fenomena kontemporer atau terkini.

### **2. Unit Analisis Data**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Relasi dalam Pengelolaan BUMNag, Interaksi Antara Pemerintah Nagari dan BUMNag, Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

c. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikonto (2016) subjek penelitian menjelaskan bahwa benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti tentang permasalahan berada dan diamati oleh peneliti, sehingga peneliti harus menentukan informan dalam penelitian tersebut. Teknik penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2020) dimana teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel sumber data yang menggunakan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti lebih mendahulukan penentuan kriteria untuk subyek penelitian.

Dalam mendapatkan yang dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan pokok penelitian, maka berdasarkan data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian dapat diketahui identitas informan yang meliputi Nama, Umur, dan jabatan. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Direktur Bumrag, Sekretaris Bumrag, Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BAMUS), Ketua Karang Taruna, Masyarakat, dan Masyarakat. Dengan adanya informan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan komprehensif. Serta peneliti dapat melakukan wawancara yang lebih mendetail dan *eksploratif*, sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak.

Tabel 1 : Data Informan

No.	Nama	Umur	Jabatan
1	Nanang Anwar	56	Wali Nagari
2	Gusnedy	58	Sekretaris Nagari
3	Susi Rahmiati	55	Direktur Bumrag
4	Ilham	35	Sekretaris Bumrag
5	Afrizal	48	Ketua Bamus
6	M. Arif	30	Sekretaris Karang Taruna
7	Rena	37	Masyarakat
8	Menek	40	Masyarakat

Sumber: Hasil wawancara informan, 2024

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan peninjauan langsung untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran penelitian yang dilakukan. Menurut Patton (1990) dalam Haryono (2020), observasi adalah metode penelitian yang penting untuk memahami fenomena dan memperkaya pengetahuan. Observasi digunakan untuk melihat, mengamati, mencermati, serta merekam tata kelola BUMNag, relasi dan interaksi antara pemerintah nagari dan bumnag, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat proses tata kelola bumnag

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang dilakukukan melalui tanya jawab untuk bertukar ide dan informasi, yang dapat menghasilkan makna dalam suatu topik tertentu.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan informasi collaborative governance dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang kemudian digunakan di lapangan agar mendapatkan informasi yang akan mendukung hasil observasi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, dan laporan, serta keterangan, yang dilakukan untuk penyimpanan dokumen dengan aktualitas penulisan sumber informasi tertentu, seperti buku, risalah, amanat, dan undang-undang.



Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari hasil wawancara mendalam terhadap informan. Data yang berkaitan dengan collaborative governance dalam pengelolaan badan usaha milik Nagari di Nagari Taram yang nantinya membantu peneliti dalam menganalisa dan melihat seluruh data berupa foto, rekaman dan dokumen tertulis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, menurut Sugiyono (2018). Namun, menurut Moleong (2017), analisis data adalah proses mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan membuat hipotesis kerja.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model analisis interaktif. Dimana data dikumpulkan, dipilih, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan yang berbeda-beda. Untuk menguji kejujuran dan integritas subjek dengan mengungkapkan kenyataan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan atau dibayangkan, maka perlu menggunakan metode verifikasi data dengan menggunakan analisis triangulasi. Teknik pengumpulan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan mewawancarai beberapa informan kunci guna memperoleh informasi penting tentang fokus penelitian, peneliti melakukan pengumpulan dokumen resmi yang paling mengetahui terkait

fokus penelitian, melakukan pengamatan lapangan tentang kondisi lapangan serta informasi-informasi lain yang dianggap perlu.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya merupakan penggambaran data yang telah dikumpulkan, sebagaimana persiapan dalam melakukan analisis data. Disini peneliti dengan menyajikan data maka akan mempermudah peneliti dalam memahami mengenai apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti menyajikan data maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, yakni membangun kesimpulan sementara yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dari data-data yang dikumpulkan. Perumusan kesimpulan yang bersifat sementara, dalam hal ini juga bersifat terbuka dan menyikapinya secara detail untuk dilakukan verifikasi secara berkelanjutan guna mendukung suatu kesimpulan yang lebih rinci dan mengakar, atau dapat dikatakan dalam hal ini penelitian melakukan triangulasi data.

## BAB II

### PROFIL NAGARI TARAM

#### A. Sejarah Nagari Taram

##### 1. Asal-usul Nagari Taram

Nagari Taram berasal dari istilah *Terandam*, dilihat secara geografis letak Nagari Taram dibandingkan dengan nagari sekeliling tampak sangat rendah dari arah manapun. Berdasarkan sisi geografisnya jalan menuju nagari Taram menurun dan sering terendam air jika curah hujan tinggi yang diakibatkan oleh limpahan air dari dua sungai di sekeliling nagari Taram. Berdasarkan analisa tersebut lama kelamaan kata “*terendam*” berubah menjadi “*taharam*” yang artinya rendah akhirnya menjadi TARAM.

Nenek moyang nagari Taram berdasarkan cerita yang berkembang mula-mula menginjakkan kakinya di Nagari Taram banyak menemukan rumpun “bamboo” yang batangnya kecil dan tipis-tipis. Batang atau rumpun bamboo tersebut jika di injak akan mengeluarkan bunyi “RAM”, sesuai dengan bunyinya maka nenek moyang pada waktu itu menamai batang atau rumpun bamboo tersebut rumpun RAM. Suatu waktu nenek moyang Nagari Taram membuat perkampungan sebagai tempat bermukim dan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi, nenek moyang tersebut membuat rumah di perkampungan tersebut dengan menggunakan batang atau rumpun bamboo yang telah mereka namai dengan rumpun RAM. Atas dasar tersebut dalam perkembangannya perkampungan yang telah menjadi luas dan diberi nama TARAM.

Nagari Taram menurut riwayat yang ada dalam Luhak 50 Koto, Nagari ini termasuk Nagari baru kalau dibandingkan dengan Nagari-Nagari lainnya.

Asal mulanya Nagari ini adalah padusunan orang Air Tabit dan langsung dibawah kekuasaan Nagari Air Tabit, setiap tahun penduduk dusun ini mengantar upeti ke Air Tabit.

Lama-kelamaan Nagari ini berkembang dengan pesat, penduduknya bertambah banyak juga karena tanahnya subur dan letaknya di aliran batang Sinamar sebagai jalur lalu lintas perdangan. Karena Nagari ini memiliki tanah yang subur membuat daerah ini menjadi makmur dengan hasil pertanian yang melimpah, Kerena hasil yang melimpah itu, maka daerah ini menjadi penting, sebab banyak dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari luar daerah. Namun tidak dalam perdagangan saja tetapi juga dalam kebudayaan, politik, pemerintahan, dan agama.

Penduduk daerah ini semasa itu memeluk Agama Hindu, dimana daerah ini mendirikan sebuah prasasti yang berupa patung dari batu, patung tersebut terdapat di bukit gadang. Pada hari-hari tertentu, umat Hindu membawa sesajian ke patung tersebut, yang dikenal sebagai “Antaran”. Kemudian kata-kata antaran itu lama-kelamaan berubah menjadi Taram. Setengah riwayat mengatakan Taram itu berasal dari Toran, yaitu sebangsa bambu yang banyak terdapat di daerah ini. Jadi kata Toran berubah menjadi Taram. Riwayat yang lain menyebutkan kata Taram berasal dari Taoram, artinya terendah dari daerah-daerah lain disekitarnya. Pendapat yang lain mengatakan Taram berasal dari kata MaTaram. Karena penduduk Nagari ini waktu itu memeluk agama Hindu, mungkin yang membawa agama tersebut kesini orang-orang atau saudagar-saudagar dari Kerajaan MaTaram di Pulau Jawa. Karena dinamika daerah ini bagus kemudian kata MaTaram menjadi Taram saja.

Adapun yang menghuni Nagari Taram pertama kali adalah nenek moyang orang Bodi Durian Gadang. Kepala kaumnya bergelar Datuak Indo Marajo Nan Panjang. Kemudian datang Datuk Tumanggung Kayo dengan rombongannya dari Nagari Air Tabit. Seperti yang dijelaskan di atas sesudah daerah ini menjadi ramai, maka daerah ini langsung dikuasai oleh Nagari Air Tabit. Setelah berapa lama daerah ini dikuasi oleh Nagari Air Tabit tidak ada kemajuan dan kejelasan. Pada akhirnya penduduk daerah ini ingin melepaskan diri dari kekuasaan Nagari Air Tabit dan membentuk pemerintahan sendiri.

Namun Nagari Air Tabit tidak mau melepaskan begitu saja. Kemudian terjadilah peperangan antara Taram dengan Air Tabit. Perang itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Dimana masyarakat Taram menghadapi dua lawan yaitu Air Tabit dan Andalas. Andalas ikut perang karena khawatir kalau Taram menang perang tentu Taram akan menyerangnya juga, karena tanah subarang aliran Batang Sinamar dikuasai oleh Andalas. Tentu Andalas tidak ingin daerah subarang tersebut lepas dari tangannya.

Untuk menghadapi dua lawan perajurit-prajurit Taram tidak sanggup. Karena hal ini penduduk terpaksa mundur ke daerah compo. Nemun perjuangan masyarakat tidak sampai disitu, kemudian dimintalah bantuan ke Nagari-Nagari lain seperti ke Payobasung, Tiakar, Bukik Limbuku dan Batu Balang. Berkat bantuan perang tersebut dimenangkan oleh Taram. Maka saat itu berakhir kekuasaan Nagari Air Tabit di Taram dan daerah Subarang. Kemudian Taram memperluas daerahnya ke arah timur sampai ke Bukit Barisan dan Rimbo Piatu. Ke Barat sampai Rimbo ke Batu Badulang. Ke

Utara sampai ke Karambia Nan Condong-condong. Ke selatan sampai ke Bukit Pancaminan.

Sejak saat itu disusun pemerintahan di Nagari Taram menurut ketatanegaraan oleh nenek moyang dibagi atas enam suku. Yaitu Koto Piliang, Bodi Caniago, Malayu, Pitopang, Sumabur, dan Sumpadang. Kemudian karena Koto Piliang terlalu besar daerahnya, akhirnya dibagi menjadi dua bagian yaitu Piliang Godang dan Piliang Laweh. Sejak itu terdapat tujuh suku di Nagari Taram.

Tiap-tiap suku mempunyai hak otonom, artinya tiap-tiap suku *Menggantiang Putuih Mambiang Cabiak*. Nagari sifatnya hanya mamacik raja. Carak kepala pemerintahan di Taram *Bebasa Ampek Balai*. Terdiri dari *Pucuk, Bandaro, Kandi, dan Ampang Limo*. Di dalam tiap-tiap suku bernama *Ninik Mamak Nan Duo Puluah Ampek*. Untuk penjaga keamanan tiap suku dan juga semua penghulu mempunyai *hulu Balang*. Untuk menjalankan dan menyampaikan perintah tiap suku dan penghulu mempunyai seorang *pegawai*.

Setiap suku dipimpin oleh Pucuk Suku, dan di setiap suku terdapat Kampung yang dipimpin oleh Tuo Kampung. Ada suku yang memiliki 4 (empat) dan 3 (tiga) Kampung. Sehingga secara total, jumlah kampung di Nagari Taram adalah 24 (Dua Puluh Empat), dan setiap kampung dipimpin oleh Ka Ampek Suku, yang kemudian menjadi Ninik Mamak 24.

## 2. Asal-usul dan Bentuk Pemerintahan Nagari Taram

Pada tahun 1833, Pemerintahan Belanda membentuk tingkat pemerintahan terendah yang disebut kelurahan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 13 kelurahan yang dikenal sebagai 13 Laras, termasuk Taram

yang menjadi satu kelurahan dengan Bukit Limbuku dan Batu Balang, yang disebut kelurahan Taram. Dari 9 kelurahan terakhir, salah satunya dipimpin oleh Dt. Paduko Simarajo Nan Panjang dari suku Sumpadang.

Pada tahun 1850, seluruh laras dan pucuk suku diangkat oleh Pemerintah Belanda menjadi Pegawai Kolonial. Pada tahun 1913, kelurahan dihapus dan diganti dengan Demang, serta di Nagari diangkat Kepala Nagari. Dari tahun 1979 hingga 2000, sistem pemerintahan nagari terdiri dari 5 Nagari, yaitu Nagari Tanjung Kubang, Nagari Balai Cubadak, Nagari Parak Baru, Nagari Tanjung Ateh, dan Nagari Sipatai.

Pada tahun 2001, terjadi perubahan Pemerintahan Desa menjadi Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Pada awalnya di Nagari Taram terdapat 5 (lima) Jorong, namun seiring waktu terjadi pemekaran menjadi 7 (tujuh) Jorong, yaitu: Jorong Balai Cubadak, Jorong Tanjung Kubang, Jorong Parak Baru, Jorong Tanjuang Ateh, Jorong Sipatai, Jorong Subarang (Pemekaran Tahun 2003), Jorong, Ganting (Pemekaran Tahun 2003). Bentuk pemerintahan di Nagari Taram adalah federasi. Pemerintahan Nagari dipusatkan di *balerong adat* atau *balai koto*. Yang menyangkut dengan keamanan dilakukan di *balai* tengah.

Tabel 2 : Nama-nama Kepala Nagari atau Wali Nagari dari tahun 1901 s/d Sekarang

NO	NAMA KEPALA NAGARI WALAI NAGAR	PERIODE	KETERANGAN
1	Gaek Dt.Paduko Bosa	1901	Suku Pitopang
2	Tenang Dt.Tumanggung Nan Panjang	1908	Suku Piliang Godang
3	Tamin Dt.Tan Simarajo Nan Panjang	1920	Suku Sumabur
4	H.Dt.Rajo Mangkuto Nan Gomok	1930	Suku Piliang Godang
5	F.Dt.Paduko Besar	1935	Suku Pitopang
6	Dt.Rajo Sampono Nan Bajangguk	1940	Suku Piliang Laweh
7	R.Dt.Rajo Dirajo (Wali Otonomi)	1945	Suku Melayu
8	Dugo Dt.Rajo Sampono Nan Hitam	1948	Piliang Laweh
9	Engku Rusli (Wali Perang)	1949	Suku Bodi
10	Sy.Dt.Bagindo Simarajo Nan Bakupiah	1956	Suku Piliang Laweh
11	R.Dt.Singgo Nan Bamejan	1953	Suku Sumabur
12	Sy.Dt.Bagindo Simarajo Nan Bakupiah	1956	Sukupiliang Laweh
13	Djauharden	1960	Suku Bodi
14	Marisan	1964	Suku Bodi
15	N.Dt.Tan Simarajo Nan Bangiang	1966	Suku Sumabur
16	M.Dt.Majo Kayo Nan Putih	1969	Suku Sumpadang
17	Jamaludin.R	1970	Suku Piliang Godang
	Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1979 Menjadi Desa		
	Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari		
18	Syafril.R.Dt.Tan Panggulu Nan Hitam	2001-S/D 2006	Suku Sumabur
19	Pjs Mulyadi Dt. Bagindo Basa Nan Karut	2006 S/D 2008	Suku Melayu
20	Pjs Gusnedy	2008	Suku Sumpadang
21	Zulkifli	2008 S/D 2014	Suku Pitopang
22	Pj.Gusnedy	2014 S/D sekarang	Suku Sumpadang
23	Defrianto Ifkar, S.Si	2016-2022	Suku Piliang Godang
24	Nanang Anwar, SE	2022-sekarang	Suku Piliang Laweh

Sumber: Profil Nagari Taram



## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi Nagari Taram**

“Terwujudnya masyarakat Taram yang bersatu, berkeadilan, dan bermartabat menuju kesejahteraan dibawah lindungan dan ridho Allah swt”.

### **2. Misi Nagari Taram**

- a. Mewujudkan hubungan harmonis antara pemerintahan dan ninik mamak pemangku adat (KAN) serta bundo kanduang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam struktur adat minang sehingga tercapai saling pengertian dan saling menguatkan menuju cita-cita bersama.
- b. Senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada pemuda pelajar dan mahasiswa dalam berkarya dan mengembangkan diri menuju prestasi yang gemilang.
- c. Mewujudkan sistim ekonomi berbasis kerakyatan serta penguatan lembaga-lembaga ekonomi Nagari (LPN mungkin perlu dihidupkan kembali) serta menggali potensi-potensi ekonomi Nagari dan sumber daya alam Nagari Taram dengan tidak merusak lingkungan/alam Nagari Taram menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
- d. Menjaga dan mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Nagari Taram sehingga tercipta masyarakat madani dibawah lindungan dan ridho Allah SWT.
- e. Mendukung program *Jam'iyatul Qura'*, Majelis Taklim untuk melanjutkan generasi beragama, beriman, dan bertakwa demi terciptanya masyarakat berakhlak dan bermartabat.

- f. Memaksimalkan peran serta potensi anak Nagari Taram diperantauan untuk seayun selangkah dalam setiap gerak pembangunan Nagari menuju cita-cita bersama.

### **C. Keadaan Geografis**

Keadaan geografis merupakan sebuah keadaan dipermukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Pada bab ini akan dijelaskan kondisi geografis yang ada di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Nagari Taram berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Taram: 60,59 kilometer persegi atau 14,54 persen dari luas wilayah Kecamatan Harau. Berjarak sekitar 5 kilometer dari ibu kota kecamatan, 7 kilometer dari ibu kota kabupaten Sarilamak. Nagari ini terletak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Nagari sekitarnya, dengan jalannya cenderung menurun dari setiap arah masuk dan sering kali tergenang oleh dua sungai, yaitu Sinamar dan Mungo. Nagari Taram mempunyai curah hujan rata-rata /tahun dan berada di 580-650 DPL dan koordinat Kantor Nagari Taram ML = 533,LT = 00.21168 LS – 100.69379 BT.

Nagari Taram mempunyai luas wilayah 6.059 Ha. Yang terdiri dari, tanah saawah dan, tanah kering. Dimana tanah sawah mempunyai irigasi setengah sawah, seluas 7.81 Ha. Dan tanah kering, mempunyai tanah yang digunakan sebagai pekarangan/bangunan seluas 61.53 Ha. Kemudian ada juga tanah kering yang berfungsi sebagai hutan yang mana memiliki luas 44.126. Ha.

Nagari Taram yang terletak antara Nagari Kota Payakumbuh dengan Propinsi Riau yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Nagari Bukit Limbuku Kec.Harau
2. Sebelah Selatan : Nagari Andaleh Kec.Luak
3. Sebelah Barat : Kelurahan Payobasung Payakumbuh
4. Sebelah Timur : Nagari Pilubang dan Propinsi Riau

Sementara jorong yang ada di Nagari Taram sebanyak tujuh jorong setelah adanya pemekaran dimana awalnya hanya terdapat lima jorong. Adapun jorong yang terdapat Nagari Taram yaitu:

1. Jorong Balai Cubadak
2. Jorong Tanjung Kubang
3. Jorong Parak Baru
4. Jorong Tanjung Ateh
5. Jorong Sipatai
6. Jorong Subarang (Pemekaran Tahun 2003)
7. Jorong Ganting (Pemekaran Tahun 2003)

Selanjutnya akan ditampilkan tabel luas wilayah Nagari Taram berdasarkan penggunaannya yaitu:

Tabel 3 : Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaannya

No	Sektor	Luas Lahan
1	Sawah	934,00 Ha
2	Tegal/Lading	68,00 Ha
3	Pemukiman	2.000,00 Ha
4	Pekarangan	199,00 Ha
5	Kas Desa	5,00 Ha
6	Sawah Desa	5,00Ha
7	Lapangan Olahraga	1,00 Ha
8	Pemukaman Desa	0,40 Ha
9	Bangunan sekolah	6,00 Ha

10	Pasar	1,00 Ha
11	Tangkapan air	2,00 Ha
12	Usaha Perikanan	15,00 Ha
13	Hutan lindung	804,00 Ha
14	Hutan adat	2.023,60 Ha
15	Suaka Margasatwa	150,00 Ha
<b>Total</b>		<b>6.209,00 Ha</b>

Sumber: RPJM Nagari Taram, 2022-2028

Berdasarkan tabel di atas lahan yang paling banyak digunakan adalah Hutan Adat seluas 2.023,60 Ha sedangkan penggunaan lahan yang paling sedikit adalah Pemakaman Desa seluas 0,40 Ha. Dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Nagari Taram adalah area Hutan dibuktikan dengan wilayah untuk sektor Hutan lindung seluas 804,00 Ha, Hutan Adat 2.023,60 Ha dan Suaka Margasatwa 150,00 Ha.

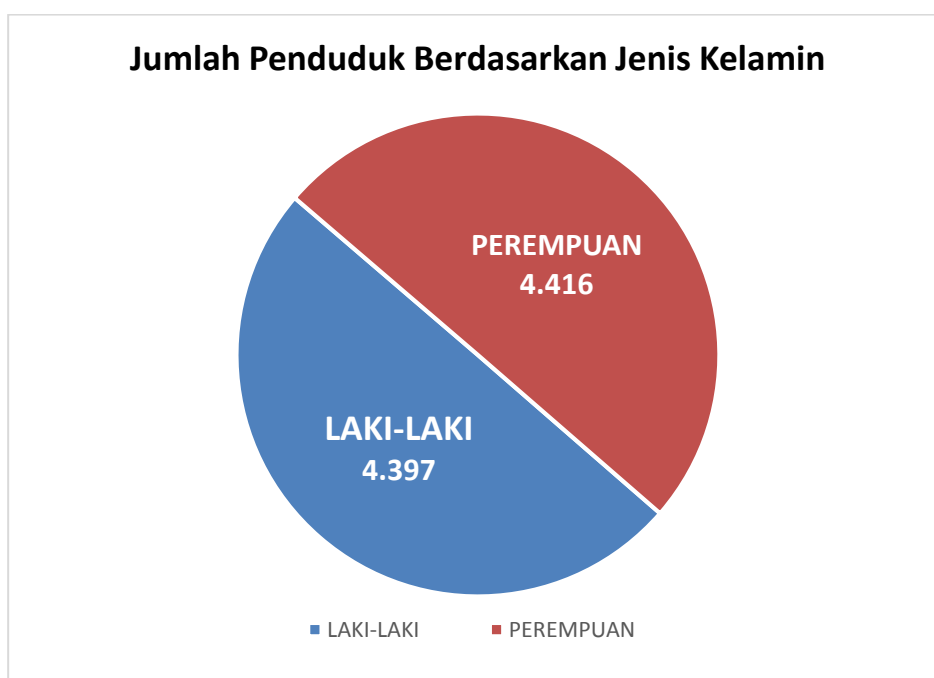
#### **D. Keadaan Demografis**

Data demografis penting bagi pemerintah Nagari karena dapat membantu dalam pemantauan masyarakat di wilayah tersebut. Informasi demografis meliputi data distribusi penduduk, ukuran populasi, struktur demografi, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan proses penuaan. Dengan informasi demografis ini, Nagari dapat memahami lebih baik kondisi dan dinamika populasi. Analisis kependudukan dapat ditentukan berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, agama, usia, jumlah kepala keluarga (KK), tingkat Pendidikan, mata pencariin dan jumlah pengangguran.

##### **1. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

Data penduduk Nagari Taram berdasarkan klasifikasi jenis kelamin menyajikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara demografis jumlah penduduk Nagari Taram adalah 8.813 jiwa. Berikut tabel yang menyajikan keadaan demografis di Nagari Taram.

Gambar 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin



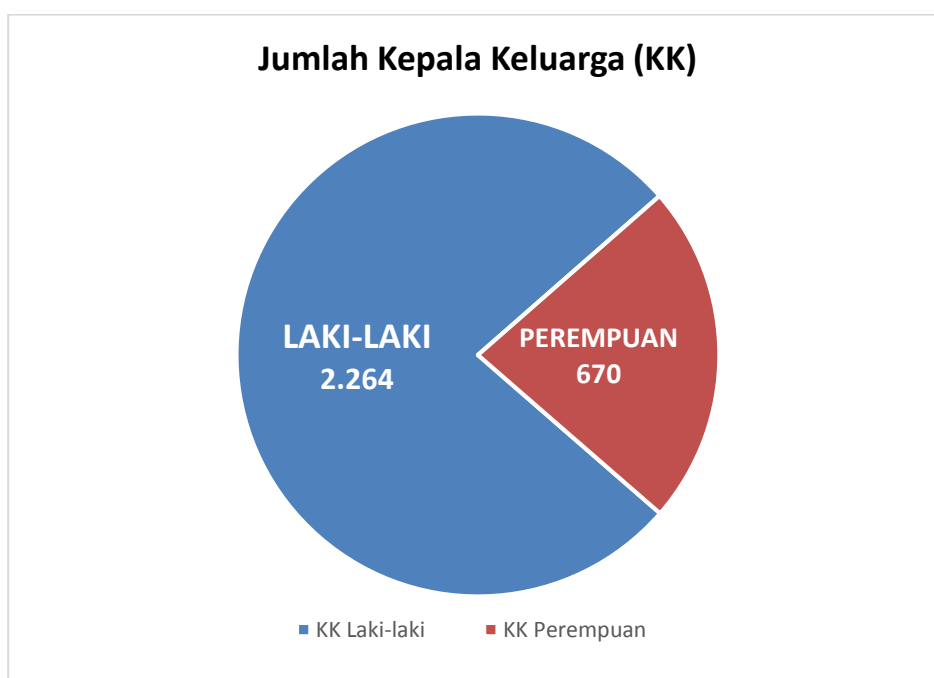
Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Taram

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Nagari Taram yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.397 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.416 jiwa sehingga jumlah total penduduk berdasarkan jenis kelamin sebanyak 8.813. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak atau lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

## 2. Data Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Nagari Taram memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terbagi menjadi dimana KK Laki-laki dan KK Perempuan. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK).

Gambar 2 Jumlah Kepala Keluarga (KK)



Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Taram

. Berdasarkan diagram di atas, Nagari Taram memiliki total 2.934 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam dua kategori, yaitu KK Laki-Laki dan KK Perempuan. Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah KK Laki-Laki mencapai 2.264, sementara jumlah KK Perempuan hanya 670. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah KK Laki-Laki dan KK Perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kartu keluarga pada kategori perempuan.. Pertama, peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perubahan sosial dan ekonomi. Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pendaftaran data keluarga secara lebih akurat. Ketiga, perempuan yang menjadi kepala keluarga ada yang janda dan juga lansia. Keempat, kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya pencatatan data keluarga. Semua faktor ini berkontribusi pada angka tersebut.

## 2. Data Penduduk berdasarkan Agama

Setiap warga negara di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinan agamanya sesuai dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dalam meyakini kepercayaan. Negara Indonesia memiliki 6 kepercayaan yang dimiliki diantaranya yaitu: Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Islam, dan Khonghucu.

Agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Nagari Taram adalah Islam dengan jumlah sebanyak 8.813 jiwa. Di Nagari Taram hanya terdapat satu agama yang di anut oleh masyarakatnya yaitu, Islam. Nagari Taram memang dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan Islam yang termasuk awal di Minangkabau. Taram telah menjadi pusat pengembangan Islam yang terkemuka pada abad ke 17 di Surau Tuo Taram. Islam pertama kali dikembangkan di Taram oleh Syekh Ibrahim Mufti. Saat itu ia punya banyak murid yang akhirnya turut mengembangkan Islam ke pelosok Minang. Setelah 400 tahun, Surau Tuo Taram yang dibangun Syekh Ibrahim Mufti masih dipakai sebagai tempat ibadah dan dikelola secara adat oleh masyarakat Taram

#### 4. Data jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14 Tahun (belum Produktif)	1.032	997	2.029
2	15-64 Tahun (Produktif)	3.011	2.908	5.919
3	>64 Tahun	354	511	865
<b>Total</b>		<b>4.397</b>	<b>4.416</b>	<b>8.813</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran data penduduk di Nagari Taram berdasarkan usia sebagian besarnya berada pada rentang usia 15-64 Tahun (produktif) yakni sebanyak 5.919 jiwa. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengelola dan menjalankan Badan Usaha Milik Nagari merupakan golongan usia produktif.

##### 5. Data Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/belum Sekolah	1.347
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.343
3	Tamat SD/Sederajat	1.667
4	SLTP/Sederajat	1.106
5	SLTA/Sederajat	1.853
6	Diploma I/II	40
7	Akademik/Diploma III/Sarjana Muda	121
8	Diploma IV/Strata I	328
9	Strata II	8
10	Strata III	-
<b>Total</b>		<b>8.813</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa belum tamat SD/Sederajat menduduki peringkat pertama terbanyak di Nagari Taram dengan jumlah 2.343 jiwa sebanyak 30% kemudian SLTA/Sederajat sebanyak 1.853 jiwa atau 19,12%. Kemudian dengan melihat data yang paling sedikit di Nagari Taram warga yang menempuh Pendidikan sampai perguruan tinggi adalah strata II dengan jumlah sebanyak 8 jiwa dapat dikatakan bahwa masih ada kekurangan kesadaran dan motivasi untuk sekolah.



## 6. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 6 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	914	776	1.690
2	Aparatur/Pejabat Negara	62	83	145
3	Tenaga Pengajar	9	17	26
4	Wiraswasta	1.346	192	1.538
5	Pertanian/Peternakan	1.070	468	1.538
6	Nelayan	-	-	-
7	Agama dan Kepercayaan	1	-	1
8	Pelajar/Mahasiswa	970	951	1.921
9	Tenaga Kesehatan	1	4	5
10	Pensiunan	24	13	37
11	Lainnya	-	1.912	1.912
<b>Total</b>		<b>4.397</b>	<b>4.416</b>	<b>8.813</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas mengenai sebaran data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Taram berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yakni sebanyak 1.921 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk terbanyak kedua yang berstatus pekerjaan lain sebanyak 1.912 jiwa, berdasarkan hasil observasi kebanyakan dari masyarakat yang berstatus pekerjaan petani dan berkebun, namun hampir seluruh masyarakat bergantung terhadap sektor pertanian

khususnya pertanian padi. Jumlah terbanyak ketiga adalah berstatus sebagai belum/tidak berkerja dengan jumlah sebanyak 1.690 jiwa.

#### **E. Keadaan Ekonomi**

Secara umum Nagari Taram merupakan daerah agraris dan sebanyak 90% masyarakat bermata pencarian sebagai petani khususnya pertanian padi sawah. Nagari ini mempunyai potensi pertanian padi sawah yang tinggi. Bisa dilihat dari luas panen dan jumlah produksi yang lebih tinggi. Selain bekerja di sektor pertanian, nagaritaram juga memiliki potensi unggukan di sektor lain seperti:

1. Sektor Perkebunan

Pada sektor perkebunan berdasarkan data yang dimiliki nagari bahwa sejak tahun 2007 khusus untuk perkebunan seperti kakau, karet, gambir sangat signifikan jika berbicara hasilnya. Perkebunan sangat berkembang di Nagari Taram.

2. Sektor Peternakan

Pada sektor peternakan menunjukkan grafik yang menaik disetiap tahunnya. Sektor peternakan pada masyarakat Nagari Taram mayoritas beternak sapi, ayam, dan itik.

3. Sektor Perikanan

Sektor perikanan jika digambarkan melalui grafik maka pada sektor ini tidak begitu signifikan dengan kata lain sektor perikanan biasa-biasa saja. Masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor perikanan juga tidak banyak.

4. Sektor UKM

Sektor UKM di Nagari Taram saat ini telah mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari khususnya.

Perhatian tersebut berupa pelatihan dan 56 penambahan modal usaha. Atas dasar tersebut masyarakat juga lebih giat mengembangkan sektor UKM.

#### 5. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling penting dalam penambahan pendapatan nagari. Nagari Taram sendiri memiliki keindahan alam yang baik, sektor pariwisata yang terkenal di Nagari Taram adalah keindahan alam Bukik Bulek (Bukit Bulat), sungai kapalo banda, serta berbagai peninggalan- peninggalan di masa lampau yang memiliki daya tarik bagi pengunjung untuk dapat mengetahui nilai sejarah dari peninggalan tersebut.

### F. Keadaan Sosial Budaya

Salah satu budaya khas Nagari Taram yang masih kokoh dan tidak tergerus oleh modernisasi yakni *silek tuo taram*, bela diri tradisional dari anak nagari yang dipelajari setelah mengaji di surau dan di halaman rumah gadang. Gerakan dalam *silek tuo taram* tercermin dari kondisi geografis perkampungan Taram, di mana alam menjadi guru. Setiap *pandeka silek tuo taram* memiliki filosofi mencari kawan di luar dan bertauhid kepada Allah Swt di dalam hati. *Silek tuo taram* merupakan warisan bagi anak nagari Taram baik saat merantau maupun tinggal di kampung sendiri. Merantau sebagai pemuda dahulu memberi manfaat bagi masyarakat di kampung, di mana pemuda berperan sebagai pagar nagari.

### G. Keadaan Sosial

Sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang kegiatan atau aktivitas masyarakat, dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di Nagari Taram diharapkan dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Berikut adalah sarana dan

prasarana yang ada dikalurahan sambirejo diantaranya sarana dan prasarana Pendidikan, sarana dan prasarana Kesehatan, sarana dan prasarana keagamaan, serta sarana prasarana olahraga.

Tabel 7 : Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Masjid	3
2	Mushola	43
<b>Total</b>		<b>46</b>

Sumber: Profil Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas sarana dan prasarana yang paling banyak adalah mushola sebanyak 43 Unit selanjutnya mesjid sebanyak 3 unit, banyaknya mushola dan masjid dikarenakan warga Nagari Taram semuanya beragama muslim atau beragama islam.

Tabel 8 : Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	Sekolah	Unit
1	Gedung TK/Paud	1
2	Gedung SD/Sederajat	3
3	Gedung SMP/Sederajat	6
4	Gedung SMA/Sederajat	3
<b>Total</b>		<b>13</b>

Sumber: Profil Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana Pendidikan di Nagari Taram sejumlah 4 Unit yakni TK, SD, SMP, dan SMA. Sarana dan prasarana paling sedikit sekolah TK, SD dan SMA. Gedung TK terdiri dari 1

unit, SD 3 Unit, SMA 3 dan sarana prasarana pendidikan paling banyak adalah sekolah SMP sejumlah 6 unit.

Tabel 9 : Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO	Tempat Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	3
3	Posyandu	8
<b>Total</b>		<b>12</b>

Sumber: Profil Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Taram sejumlah 3 Unit yang terbagi menjadi 3 yakni, paling sedikit adalah Puskesmas sebanyak 1 unit, paling sedikit kedua adalah Puskesmas pembantu sebanyak 3 unit dan yang paling banyak adalah Polindes sebanyak 8 unit.

Tabel 0 : Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Lapangan Olahraga	Jumlah (Unit)
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	8
3	Lapangan Volly	7
4	Lapangan Basket	1
<b>Total</b>		<b>17</b>

Sumber: Profil Nagari Taram

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana olahraga di Nagari Taram sejumlah 4 Unit yang terbagi menjadi 4 yakni, paling sedikit adalah lapangan sepak bola sebanyak 1 unit, paling sedikit kedua adalah lapangan basket sebanyak 1 unit. Sedangkan yang paling banyak pertama adalah lapangan bulu tangkis sebanyak 8 unit dan yang paling banyak kedua adalah lapangan voli sebanyak 7 unit.

## H. Kondisi Pemerintahan Nagari

### 1. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Taram secara wilayah terbagi menjadi 7 jorong dan setiap jorongnya dipimpin oleh masing-masing kepala jorong sebagai berikut:

Tabel 11 : Pembagian Jorong di Nagari Taram

NO	JORONG	KEPALA JORONG
1	Jorong Subarang	Bambang Zulwadi
2	Jorong Balai Cubadak	Edrianto, A.Md
3	Jorong Tanjung Kubang	Irsyad Sidiq
4	Jorong Parak Baru	Muhammad Ricky
5	Jorong Ganting	Ronal Wardana
6	Jorong Tanjung Ateh	Edison
7	Jorong Sipatai	Didi Yusrizal

Sumber: RPJM Nagari Taram, 2022-2028

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Nagari Taram memiliki 7 jorong dimana setiap jorong dipimpin oleh para kepala jorong. Kepala jorong sendiri memiliki fungsi dalam tugas kewilayahan dan membantu wali nagari dalam melaksanakan yang menjadi tugas

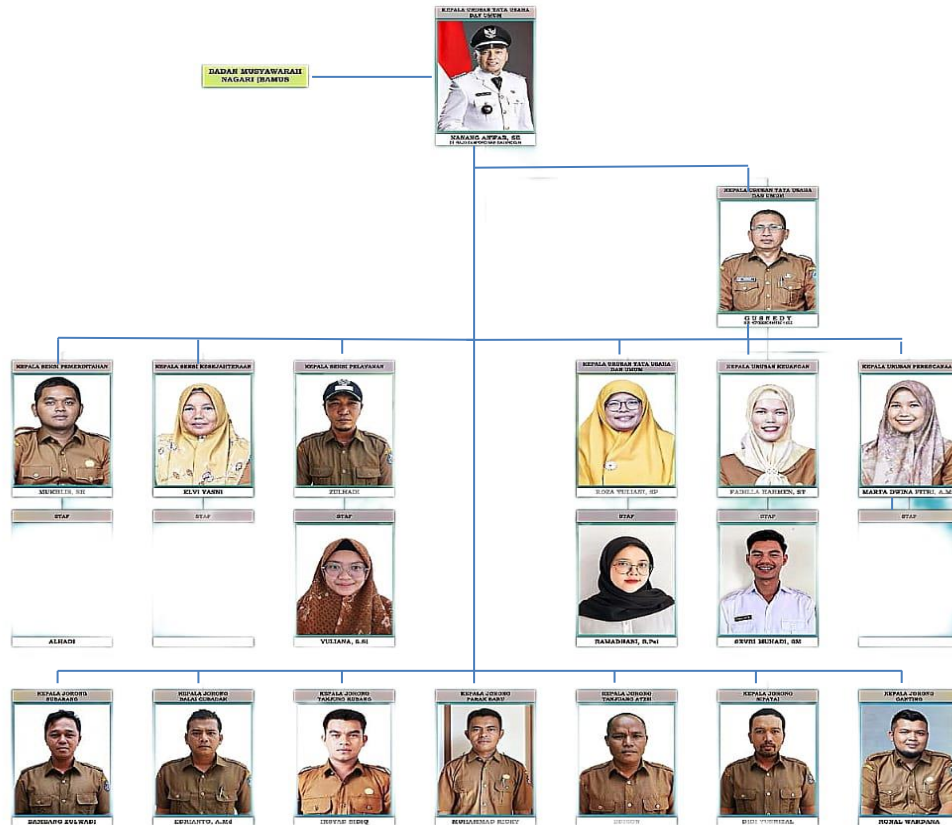
diwilayah, kepala jorong sendiri memiliki fungsi yaitu memberikan pembinaan mengenai keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan bagaimana berkaitan mengenai penataan dan pengelolaan wilayah.

## 2. Susunan Pemerintahan Nagari Taram

Nagari Taram merupakan Nagari yang memiliki struktur Pemerintahan didalamnya di mana terdapat Wali Nagari, Sekretaris Nagari, beberapa Kaur, beberapa Kasi, beberapa Kepala Jorong dan para Staf, yang di mana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Adapun struktur Organisasi Pemerintahan Nagari digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Taram



Sumber : Kantor Wali Nagari Taram

Keterangan:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Wali Nagari              | : Nanang Anwar, SE         |
| b. Sekretaris Nagari        | : Gusnedy                  |
| c. Kaur Pemerintahan        | : Mukhlis, SH              |
| d. Kaur Kesejahteraan       | : Elvi Yasni               |
| e. Kaur Pelayanan           | : Zulhadi                  |
| f. Kaur Tata Usaha dan Umum | : Roza Yuliani, SP         |
| g. Kaur Keuangan            | : Fadilla Harmen, ST       |
| h. Kaur Perencanaan         | : Marta Dwina Fitri, A. Md |



- i. Staf : Yuliana, S.Si
- j. Staf : Ramadhani, S.Pai
- k. Staf : Sevri Muhamadi, SM
- l. Kepala Jorong Subarang : Bambang Zulwadi
- m. Kepala Jorong Balai Cubadak : Edrianto, A.Md
- n. Kepala Jorong Tanjung Kubang : Irsyad Sidiq
- o. Kepala Jorong Parak Baru : Muhammad Ricky
- p. Kepala Jorong Ganting : Ronal Wardana
- q. Kepala Jorong Tanjung Ateh : Edison
- r. Kepala Jorong Sipatai : Didi Yusrizal

Dapat dilihat bagaimana struktur alur kerja pemerintah di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada gambar bagan di atas tercantum jabatan dari anggota pernag (pemerintah Nagari). Bagan di atas menggambarkan bahwa dalam pemerintahan Nagari Taram merupakan bagian pelaksana pemerintahan dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat, disisi lain adanya kontrol terhadap proses kerja pemerintah Nagari melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) BAMUS adalah mitra pemerintah Nagari. BAMUS dalam hal ini merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang dipilih secara demokratis yang nantinya menjadi wakil dari kelompok masyarakat menjadi mitra pemerintah Nagari dalam menjalankan proses roda pemerintahan di Nagari Taram.

### 3. Badan Musyawarah (Bamus)

Badan musyawarah atau yang disingkat dengan Bamus merupakan lembaga yang berfungsi untuk menetapkan peraturan nagari, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan. Badan Permusyawaratan menjabat selama enam tahun dalam satu periode kepengurusannya. Badan Permusyawaratan beranggotakan sembilan orang. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Sebagai lembaga tentunya bamus juga memiliki susunan kepengurusan, dimana susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Afrizal. DT. KTGN Mudo
- b. Wakil : MF.DT. KTGN Panjang
- c. Sekretaris : Salman
- d. Anggota : MPY DT. TSN Hitam
- e. Anggota : Rabiatul Adawiyah
- f. Anggota : Titi Efentri
- g. Anggota : Almizan
- h. Anggota : M. DT. RMN Gomok
- i. Anggota : Muhammad Zaki

Seluruh anggota Badan Permusyawaratan memiliki tanggung jawab yang signifikan sebagai legislatif nagari. Keanggotaan Badan Permusyawaratan ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan nagari di bawah kepemimpinan Wali Nagari. Diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan dapat mendukung pencapaian visi dan misi yang diusung oleh Wali Nagari. Namun, saat ini, pengawasan yang dilakukan masih tergolong lemah. Pola pengawasan yang diterapkan oleh Badan Permusyawaratan belum terorganisir dengan baik. Pengawasan yang dilakukan lebih bersifat moral terhadap Wali Nagari, yang berarti bahwa

Badan Permusyawaratan memberikan masukan atau saran terkait kinerja Wali Nagari.

#### 4. Badan Usaha Milik Nagari ( BUMnag)

Badan Usaha Milik Nagari atau yang disingkat sebagai BUMNag merupakan lembaga tingkat nagari yang tentunya diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, penyediaan layanan sosial serta menjadi sumber pendapatan Nagari. Nagari Taram juga merupakan desa yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari dimana BUMNag ini berdiri pada tahun 2017 dengan nama Sato Sakaki. Sebagai lembaga tentunya BUMNag Sato Sakaki juga memiliki susunan kepengurusan, dimana susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Direktur : Susi Rahmiati
- b. Sekretaris : Ilham
- c. Bendahara : Vina Amalia
- d. Penasehat : Nanang Anwar
- e. Dewan pengawas : Dewis Deker
- f. Dewan Pengawas : Hendri Lutfi
- g. Dewan pengawas : Susilawati

Dalam perjalanannya BUMNag Sato Sakaki telah memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan sebagai sumber pendapatannya, dimana unit usaha BUMNag diantaranya sebagai berikut, Pengeceran, Pengelolaan Pasar, Wisata Kapalo Banda, serta Pertashop dan Gas LPG.

Terkhusus untuk unit usaha Gas LPG dan Pertashop, unit usaha ini berdiri pada tahun 2020 dimana unit ini merupakan komitmen dari bumnagn untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat melalui usaha penjualan gas LPG dan penyediaan Pertashop. Dalam menjalankan usahanya, BUMNag berpegang pada prinsip untuk tidak bersaing dengan usaha yang sudah ada di masyarakat, sehingga tidak mematikan usaha masyarakat. Fokus utama BUMNag yaitu menciptakan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Relasi dalam pengelolaan BUMNag, kemudian dilanjutkan dengan membahas interaksi Pemerintah Nagari dan BUMNag, dan terakhir peneliti akan membahas mengenai Faktor penghambat dan faktor penghambat dalam pengelolaan BUMNag. Penyusunan bab ini tentunya berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh untuk penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi dari objek penelitian.

#### **A. Relasi dalam Pengelolaan BUMNag**

Relasi dalam pengelolaan BUMNag dilakukan dengan musyawarah nagari di mana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama Ansell & Gash (2008) dalam Islamy, (2018). Pelaksanaan prinsip transparansi pada BUMNag Sato Sakaki dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari yang diadakan sekali setahun pada akhir tahun yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari Taram, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan pemuka masyarakat Silsabila et al., (2024).

Relasi antara Pemerintah Nagari Taram dan BUMNag Sato Sakaki terjalin dengan wujud keterlibatan pemerintah nagari dalam pengelolaan BUMNag sato sakaki. Musyawarah merupakan metode utama dalam pengambilan keputusan di BUMNag. Proses ini dimulai dengan mengundang seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam musyawarah, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait pengelolaan BUMNag. Keputusan diambil secara kolektif, dengan mempertimbangkan masukan

dari semua pihak, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Komunikasi antara Pemerintah Nagari dan BUMNag dilakukan melalui pertemuan rutin yang diadakan sekali setahun pada akhir tahun. Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus BUMNag, pengawas, serta perwakilan dari unit-unit usaha yang ada. Agenda pertemuan mencakup laporan mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pelaksanaan setiap unit usaha, diikuti dengan diskusi mengenai berbagai permasalahan yang muncul. Dalam wawancara bersama Ibu Susi Rahmiati selaku Direktur BUMNag menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya di nagari Taram artau di Sumatera Barat rata-rata hanya melalui musyawarah nagari, untuk agendanya biasanya membahas terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan pelaksanaan unit usaha. Di dalam proses musyawarah ini bukan hanya wali nagari, bamus saja tetapi juga ada pengurus BUMNag, pengawas, toko agama, toko adat, dan masyarakat.” (Wawancara, 24 April 2024, pukul 13.15 WIB).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa relasi antara Pemerintah Nagari Taram dan BUMNag Sato Sakaki terjalin dengan baik melalui keterlibatan aktif pemerintah nagari dalam pengelolaan BUMNag. Musyawarah menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan di BUMNag, di mana proses ini dimulai dengan mengundang seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam forum musyawarah ini, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait pengelolaan BUMNag. Keputusan yang diambil bersifat kolektif, dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan BUMNag.

Sejalan dengan Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 7 yang

menyatakan bahwa musyawarah desa terdiri atas musyawarah desa tahunan dan musyawarah desa khusus. Selanjutnya pada Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 8 menyatakan bahwa musyawarah desa tahunan adalah pelaksanaan operasional menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan musyawarah desa, rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh musyawarah desa menjadi program kerja.

Sistem pengelolaan BUMNag di Nagari Taram tentu menerapkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Dalam proses musyawarah ini tentunya melibatkan pemerintah nagari, pengelola BUMNag, dan masyarakat untuk merumuskan rencana usaha serta mengevaluasi kinerja BUMNag. Setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan BUMNag, seperti pemilihan jenis usaha, pengalokasian dana, dan pembagian hasil usaha, diambil bersama dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari Nanang Anwar:

“Pembentukan bumnag berdasarkan pada Peraturan Nagari tahun 2017 tentang pendirian badan usaha milik nagari, pada saat itu dikumpulkanlah beberapa tokoh masyarakat, termasuk pemerintahan nagari yaitu wali nagari, bamus, kemudian ada tokoh adat, ada camat dan ada juga tenaga ahli pendamping desa. Sehingga pada waktu itu dibentuklah badan usaha milik nagari, dimana pengurusnya terdiri dari tiga orang direktur, sekretaris, dan bendahara. Untuk pengelola tidak ada tim seleksi, karna pada dasarnya di nagari taram atau di sumatera barat rata-rata hanya melalui musyawarah nagari, dari musyawarah ini ditunjuklah beberapa orang untuk menduduki posisi yang sudah ada. Sehingga nanti pada proses rekrutmen memilih dan menetapkan pengelola itu di setujui secara bersama ” (Wawancara, 25 April 2024, pukul 14.10 WIB).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan BUMNag Sato Sakaki ini telah melalui mekanisme musyawarah nagari yang artinya terdapat harapan dari masyarakat yang diemban oleh pengurus BUMNag Sato Sakaki agar dapat mewujudkan tujuan dari pendirian BUMNag Sato Sakaki dan dapat

meningkatkan perekonomian nagari. Musyawarah nagari merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan komitmen pengurus BUMNag Sato Sakaki untuk mendengarkan suara masyarakat dan mengakomodasi kepentingan mereka dalam pengelolaan usaha.

Meskipun sudah dilaksanakan musyawarah akan tetapi masih ada tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas informasi. Seperti laporan keuangan BUMNag sering kali sulit diakses oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengelolaan data keuangan dan sistem pelaporan yang masih sederhana. Masyarakat menginginkan akses yang lebih terbuka terhadap laporan keuangan BUMNag agar mereka bisa lebih memahami alur penggunaan dana desa dan hasil dari usaha yang dijalankan. Hal ini disampaikan juga oleh masyarakat Bapak Menek:

“Saya tidak mengetahui mengenai laporan keuangan BUMNag Sato Sakaki karena yang saya tau untuk informasi itu hanya di sampaikan kepada perwakilan masyarakat saja. Dan tidak disampaikan secara terbuka.”  
(Wawancara, 29 April 2024, pukul 15.15 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan berhubungan dengan keterbukaan bumnag kepada masyarakat secara umum. Karena dari pihak bumnag hanya menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan masyarakat saja. Dalam konteks ini, transparansi merujuk pada sejauh mana informasi keuangan disajikan secara jelas dan dapat diakses oleh publik, sementara akuntabilitas mencakup tanggung jawab BUMNag dalam mengelola dan melaporkan informasi tersebut. Keterbukaan informasi keuangan sangat penting, karena memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana dikelola dan digunakan. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan yang



lebih efektif terhadap kinerja BUMNag. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMNag, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat berkontribusi pada pengembangan BUMNag yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, BUMNag dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan program-program yang bermanfaat bagi komunitas.

Kemajuan badan usaha milik nagari tentu tidak terlepas dari berbagai campur tangan *stakeholder*, seperti yang terjadi di badan usaha milik nagari sato sakaki. Dengan adanya kerjasama yang baik melalui relasi dari berbagai stakeholder seperti: Pemerintah Nagari, Pengelola BUMNag, Pengawas, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat pelaku usaha, membuat badan usaha milik nagari menjadi kuat dalam segi pengelolaan dan pengembangan. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun BUMNag sato sakaki mengalami transisi perubahan, hal ini dikarenakan relasi dari berbagai stakeholder yang turut mengambil bagian dalam pengelolaan dan pengembangannya, yang selalu konsisten dan memegang teguh prinsip kemajuan dalam kebersamaan. Relasi ini yang menyatukan pendapat-pendapat dan prinsip kemajuan BUMNag sato sakaki.

Pemerintah nagari memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan dan dukungan kepada BUMNag. Pemerintah nagari bertindak sebagai pengawas dan pembina, sementara BUMNag menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kebijakan nagari. Dalam prakteknya, terdapat hubungan saling menguntungkan antara pemerintah nagari dan BUMNag. Pemerintah nagari memberikan dukungan berupa fasilitas, seperti tempat usaha, akses ke dana desa,

serta bimbingan teknik. BUMNag memberikan kontribusi bagi pendapatan asli nagari dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan BUMNag, relasi dari berbagai aktor seperti: pemerintah nagari, pengawas, pegelola BUMNag, tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat sudah tergolong sangat baik. Mereka mempunyai tujuan yang sama dalam memajukan BUMNag sato sakaki. Dalam wawancara bersama Bapak Gusnedy selaku sekretaris nagari taram dan menyampaikan bahwa;

“Untuk hubungan dari berbagai stakeholder, kita memiliki hubungan yang sangat baik. Terutama dalam pengelolaan bumnag ini, karena kita mempunyai prinsip yang sama yaitu mengelola ekonomi produktif agar berkembang dengan baik dan juga berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, dan bukan hanya itu kita juga mengharapkan dengan adanya BUMNag ini dapat membantu secara finansial masyarakat sekitar. Dengan pemberdayaan dan juga pembangunan yang sudah kita rencanakan diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat juga”. (Wawancara, 26 April 2024, pukul 14.42 WIB)

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait (stakeholder) merupakan aspek penting dalam pengelolaan bumnag ini. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan baik. Dengan adanya prinsip yang sama di antara stakeholder menunjukkan kesepakatan tentang cara terbaik untuk mengelola BUMNag satu sakaki ini. Fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat merupakan pijakan yang solid untuk pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

Peraturan Nagari Taram Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan BUMNag Sato Sakaki adalah meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari,

mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memulai usaha pendistribusian gas LPG dan memberikan modal untuk pertashop milik PT Tiara Fajar Semesta.

Tujuan dari usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli nagari dan memenuhi kebutuhan gas dan bahan bakar masyarakat. Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki membuka layanan distribusi gas LPG di Jorong Subarang, Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta mengoperasikan pertashop atau mini SPBU resmi Pertamina di Jorong Tanjung Kumbang, Jalan Lintas Taram-Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor yang menjadi penghambat kurang berkembangnya usaha yang dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki, untuk gas dikarenakan keterbatasan jumlah gas LPG yang didapatkan oleh BUMNag Sato Sakaki sedangkan untuk faktor penghambat pertashop diantaranya adalah pengiriman bahan bakar yang tidak menentu oleh pihak Pertamina serta faktor lainnya yaitu perbandingan selisih harga bahan bakar jenis pertamax dan pertalite yang membuat masyarakat cenderung lebih memilih membeli pertalite di SPBU Pertamina. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bamus bapak Afrizal:

“Sekarang ini ada dua lagi jenis usaha yang di kembangkan oleh bumnag yaitu gas LPG dan pertashop. kami berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti menjual gas LPG dengan harga yang lebih murah dari toko lainnya dan juga menyediakan pertashop agar masyarakat mendapat bahan bakar lebih mudah. Kemudian sesuai aturan BUMNag, kalau dapat usaha yang didirikan bukan yang menyaingi usaha yang sudah dimiliki oleh masyarakat dan tidak mematikan usaha masyarakat. Jadi karena itu BUMNag menjalankan usaha-usaha yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Seperti pendistribusian gas LPG dan bagi hasil penyertaan modal pada pertashop. Ada berapa kendala seperti faktor pada pertashop yang diakibatkan

oleh perubahan harga pertamax yang mengakibatkan kurangnya pembelian dari masyarakat. Dan kendala dari pemuaian pada mesin pompa. Dan faktor lainnya yang meghalagi perkembangan usaha bumnag kami ada pangkalan bumnag, masyarakat juga buat pangkalan tersebut. Padahal dari pangkalan ini banyak membantu masyarakat. Baik dari Dana, kemauan, skill, dan Sumber daya manusianya.” (Wawancara, 26 April 2024, pukul 14.14 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMNag Sato Sakaki berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui usaha penjualan gas LPG dan penyediaan Pertashop. Dalam menjalankan usahanya, BUMNag berpegang pada prinsip untuk tidak bersaing dengan usaha yang sudah ada di masyarakat, sehingga tidak mematikan usaha masyarakat. Fokus utama BUMNag yaitu menciptakan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan energi dan bahan bakar. BUMNag Sato Sakaki menghadapi beberapa kendala dalam operasional usaha ini. Salah satu kendala utama yaitu perubahan harga Pertamina yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dari Pertashop. Dan dari masalah teknis seperti pemuaian pada mesin pompa juga menjadi hambatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional Pertashop. Meskipun BUMNag Sato Sakaki telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, tantangan yang dihadapi dalam operasional usaha perlu diatasi melalui strategi yang efektif. Diperlukan kolaborasi antara pengurus BUMNag, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memastikan keberhasilan usaha ini di masa depan.

Lebih lanjut mengenai usaha yang telah dijalankan BUMNag, hal ini juga disampaikan oleh Direktur Bumnag Ibu Susi Rahmiati:

“Pada tahun 2020 dan 2021 itu bermitra dengan salah satu pengelola pertashop PT Tiara Fajar Semesta. Mampu memberikan deviden atau laba bagi masyarakat. Disamping itu bumnag juga mendirikan pangkalan gas lpg tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat nagari taram. Sehingga gas LPG ini juga sudah memberikan pendapatan asli desa kepada nagari. Pada

22021 bumrag memberikan kontribusi kepada nagari Rp. 4.500.000 dan pada tahun 2022 sebanyak 5.000.000” (Wawancara, 24 April 2024, pukul 13.15 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) memiliki potensi untuk memberikan dividen atau laba kepada masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan gas masyarakat melalui pendirian pangkalan gas LPG dan Pertashop. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal. Dengan mendirikan pangkalan gas LPG, BUMNag dapat menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan energi rumah tangga. Selain itu, keberadaan Pertashop sebagai penyedia bahan bakar juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka. Keberhasilan BUMNag dalam menjalankan usaha ini akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Keberadaan BUMNag yang mampu memberikan dividen kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan gas melalui pendirian pangkalan gas LPG dan Pertashop merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian nagari. Diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan keberhasilan usaha ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga nagari.

Berdasarkan Peraturan Nagari Taram Nomor 2 Tahun 22 tentang Badan Usaha Milik Nagari seharusnya BUMNag Sato Sakaki dapat mengelola seluruh objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram itu sendiri. Namun, pada kenyataannya saat ini BUMNag Sato Sakaki belum bisa mengambil hak pengelolaan terhadap objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram seperti Wisata Kapalo Banda. ketika wisata tersebut telah dikelola oleh BUMNag, Ketua BUMNag nantinya akan melakukan

kerjasama dengan pihak lain termaksud melibatkan Karangtaruna dalam pengelolaannya sehingga Lembaga kepemudaan tersebut dapat terberdayakan. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris BumNag Bapak Ilham:

“Pemerintah nagari dan ketua adat ingin sekali kalau wisata itu ada dalam naungan bumNag akan tetapi ada beberapa pertimbangan dari pemerintah nagari dikarenakan aset-aset nagari ini masih di butuhkan oleh nagari untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang membuat nagari tidak bisa untuk mengakomodir dalam dana nagari.” (Wawancara, 23 April 2024, pukul 13.37 WIB)

Lebih lanjut hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Susi Rahmisti selaku Direktur BUMNag :

“Iya mba, nantinya ketika hak pengelolaan wisata tersebut telah diberikan ke kami, dalam pengelolaannya kami akan melibatkan Karangtaruna. Dikarangtaruna itu isinya kan anak-anak muda, tentu mereka punya inovasi-inovasi yang mereka tau tentang perkembangan zaman, pengetahuan itu yang kita butuhkan untuk bagaimana kedepannya mengelola dan mengembangkan wisata ini” (Wawancara, 24 April 2024, pukul 14.30 WIB)

Mengenai rencana pengelolaan wisata yang disampaikan oleh Ketua BUMNag diatas, hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Arif selaku Sekretaris Karangtaruna:

“Benar mba, pengelolaan wisata itu memang pernah dibahas oleh Ketua BUMNag, katanya kami yang akan dilibatkan dalam pengelolaan nantinya. Tentu kami senang mba, karna kami mau dilibatkan dalam pengelolaannya, kami juga berharap nantinya tidak hanya pada pengelolaan wisata kami dilibatkan, kalau bisa dibagian yang lain juga kami dilibatkan. Biar teman-teman pemuda yang tidak lanjut sekolah ini ada kegiatan yang menghasilkan juga mba” (Wawancara 29 April 2024, pukul 13.00 WIB) )

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait pengelolaan wisata Kepalo Banda saat ini terletak pada pengelola yang ada. Pemerintah nagari masih membutuhkan aset-aset nagari untuk dikelola dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dapat ditutupi oleh dana nagari. Semua pihak yang terlibat untuk segera melakukan dialog dan negosiasi guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pengelolaan wisata Kepalo Banda dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat nagari.

Penyelesaian permasalahan ini tidak hanya akan meningkatkan pengelolaan objek wisata, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain dengan melibatkan karang taruna dalam pengelolaannya, tentu hal ini juga membawa dampak positif terhadap pemuda sebagai bentuk pemberdayaan pemuda. Langkah untuk mencapai harapan tersebut tentu diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan potensi wisata yang ada, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nagari secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa relasi dalam pengelolaan BUMNag melalui proses musyawarah untuk pengambilan keputusan yang melibatkan semua *stakeholder* dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Musyawarah dimulai dengan pengundangan semua pihak untuk hadir dalam pertemuan, di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Mekanisme komunikasi antara pengelola BUMNag dan stakeholder lainnya dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, laporan berkala, dan forum diskusi. Pengelola BUMNag harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan transparan, sehingga semua pihak dapat memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Namun, dalam membangun relasi yang baik, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini meliputi keterbatasan informasi keuangan, harga pertamax yang cukup tinggi, serta BUMNag belum bisa mengelola wisata kepala banda yang ada di nagari taram.

## **B. Interaksi Antara Pemerintah Nagari dan BUMNag**

Interaksi antara pemerintah nagari bumrag dilakukan dengan adanya keterlibatan dari Wali Nagari Taram dalam setiap perencanaan kegiatan usaha yang

dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki. Kemudian, BUMNag Sato Sakaki juga menerima dan terbuka dalam masukan-masukan dari berbagai pihak yang ingin memberikan masukan untuk lebih baik BUMNag Sato Sakaki kedepannya (Silsabila et al., 2024). Sejalan dengan itu di dalam interaksi antara pemerintah nagari dan bumnag terdapat suatu komunikasi serta partisipasi dari para pemangku kepentingan, yang menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama Ansell & Gash (2008) dalam Islamy, (2018).

Interaksi antara pemerintah nagari dan BUMNag juga berjalan dengan sangat baik, seperti dalam memberikan bantuan kepada BUMNag untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya kebijakan yang jelas, dukungan pendanaan yang memadai, dan bimbingan teknis yang tepat, BUMNag dapat beroperasi secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari. Sinergi antara pemerintah nagari dan BUMNag akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi lokal. Dalam wawancara bersama Bapak Nanang Anwar selaku Wali Nagari menyampaikan:

“Interaksinya sangat bagus sekali ya, wali nagari sabagai penasehat, tentu berkewajiban juga bagaimana caranya untuk memajukan bumnag. Baik dari segi finansial, dari sisi operasionalnya. Jadi selama ini kolaborasinya sangat bagus dan erat sekali walaupun usahanya masih kecil, tapi alhamdulillah bumnag setiap tahun selalu memberikan konstibusi untuk pendapatan asli nagari”. (Wawancara, 25 April 2024, pukul 15.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpullkan bahwa Interaksi yang baik antara pemerintah nagari dan BUMNag Sato Sakaki merupakan contoh kolaborasi yang efektif dalam pengembangan ekonomi desa. Dukungan kebijakan, pendanaan, dan bimbingan teknis dari pemerintah nagari sangat penting untuk memastikan keberhasilan BUMNag. Dengan sinergi yang kuat, BUMNag dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan



pembangunan nagari secara keseluruhan. Keberlanjutan usaha BUMNag akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah nagari dan masyarakat untuk terus mendukung dan mengembangkan inisiatif ini.

Interaksi tentu merupakan hal utama dalam proses pengelolaan BUMNag, di mana dengan membangun relasi dan interaksi yang baik akan membuka peluang kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Begitupun dengan membangun relasi dan interaksi yang baik terhadap Pemerintah Nagari tentu akan mengefisienkan pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh BUMNag kedepannya.

Dalam pengelolaan BUMNag kepercayaan antar pihak yang telah dibangun melalui interaksi yang baik tentu sangat penting. Oleh karena itu, kepercayaan dari semua pihak perlu ada untuk mendukung optimalisasi dan keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMNag. dengan terciptanya saling kepercayaan antar pihak melalui interaksi BUMNag dan Pemerintah Nagari ataupun masyarakat, tentu pengelolaan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ilham selaku sekretaris bumnag sebagai berikut:

“Saya kira dalam pengelolaan kepercayaan itu sangat penting karena kita ini melakukan kerjasama. Relasi dan interaksi yang baik antara pemerintah nagari, bumnag, stakholder yang ada termasuk dengan niniak mamak sebagai pemangku adat sangat bagus sekali. Dukungan pemerintah nagari itu sangat nyata mereka ingin bumnag itu menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. Apabila nanti dana desa tidak ada maka dari sinilah menjadi sumber pendapatan.” (Wawancara, 23 April 2024, pukul 14.20 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan, dukungan, dan partisipasi aktif dari semua pihak merupakan tujuan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan BUMNag dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari. Interaksi yang baik antara BUMNag, pemerintah nagari, dan stakeholder lainnya, termasuk niniak mamak sebagai pemangku adat, menunjukkan bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMNag. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan

keberlanjutan usaha. BUMNag memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi nagari. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi antara semua pihak agar BUMNag dapat berfungsi secara optimal.

Lebih lanjut mengenai interaksi antara pemerintahan nagari, bumnag dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMNag, hal ini juga disampaikan oleh masyarakat Ibu Rena:

“Kami masyarakat berharap dapat terlibat aktif dalam pengelolaan BUMNag ini, apa lagi nanti semisal wisata sudah dikelola oleh BUMNag mungkin kami bisa dilibatkan untuk berdagang disana, dan juga kami berharap dukungan dari pemerintah nagari baik dalam bentuk fasilitas usaha ataupun pelatihan yang dapat membantu pengembangan usaha kami nantinya” (Wawancara, 29 April 2024, pukul 16.00 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki harapan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMNag. Keterlibatan aktif dari Masyarakat tentu diharapkan dapat meningkatkan pengembangan BUMNag yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya interaksi yang baik antara pemerintah nagari dan pengelola BUMNag dapat meningkatkan ekonomi nagari dan kesejahteraan masyarakat. Interaksi tersebut berupa dukungan dari pemerintah nagari dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan bimbingan teknis. Keberlanjutan usaha BUMNag akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah nagari, pengelola bumnag, pelaku usaha, dan *stakeholder* lainnya. Dukungan ini sangat penting karena untuk memastikan keberhasilan BUMNag. Dengan sinergi yang kuat, BUMNag dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari secara keseluruhan. Dengan melakukan kerjasama, diharapkan program-program dan potensi lain dari BUMNag dapat dikelola dan dijalankan

dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan keterlibatan, komitmen serta kepercayaan dari berbagai pihak guna menunjang optimalisasi pelaksanaan program atau usaha BUMNag yang sedang atau akan dilaksanakan.

### **C. Faktor-faktor yang penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMNag**

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) “Sato Sakaki didirikan berdasarkan Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022. Bumnag ini juga didirikan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di nagari, yang merupakan inisiatif dari wali nagari, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Ini berarti bahwa usaha yang akan dikembangkan berasal dari keinginan dan aspirasi untuk menciptakan kemajuan dalam komunitas nagari.

Hasil penelitian Hidayat et al., (2024) menjelaskan bahwa BUMDes Ngudi Rahardjo sudah memberikan kontribusi untuk PADesa, namun untuk pengelolaan BUMDes ini masih terkendala beberapa faktor. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan formal para pegawai dan selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana pada BUMDes Ngudi Raharjo. Di BUMDes Ngudi Rahardjo sendiri, terdapat partisipasi positif masyarakat pada pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasi.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2024), yang menjelaskan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah a) faktor anggaran, b) factor Sumberdaya Manusia pengelola. Factor pendukung sebagai penguat adalah a) komitmen pemerintah, dan b Partisipasi Aktif Masyarakat. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk

dapat berdaya saing. Dan diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjalankan program BUMDes demi mencapai ekonomi yang lebih maju.

## **1. Faktor Pendukung**

### **a. Komitmen Pemerintah**

Peran BUMNag dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didukung oleh perekonomian desa yang kuat dan terencana. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMNag terlihat melalui penyediaan dana untuk mendukung pengembangan BUMNag tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Nanang Anwar selaku wali nagari sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah nagari bersama bamus, dan juga parangkat nagari lainnya selalu mensupport apapun usaha-usaha yang di kembangkan oleh badan usaha milik nagari. Sekarang dalam perencanaan kebetulan itu belum di bawah naungan bumnag itu masih tersendiri ada komisinya dan juga ada pengelolanya sendiri. Begitupun dengan pasar nagari itupun belum di kelola secara maksimal. Tetapi kami sudah melakukan pertemuan karena baik pasar dan wisata kepala banda itu akan masuk dalam naungan badan usaha milik nagari” (Wawancara, 25 April 2024, pukul 14.00 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMNag juga terlihat dari penyediaan dana untuk mendukung pengembangan usaha tersebut. Dengan dukungan yang kuat dan perencanaan yang baik, diharapkan BUMNag dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa dan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut mengenai faktor pendukung kemajuan BUMNag dari komitmen pemerintah di nagari tarom juga disampaikan oleh Bapak Ibu Susi Rahmiati selaku Direktur BUMNag menjelaskan:

“bumnag ini belum maju tetapi masih dalam tahap berkembang, yang mendukung sudah pasti suport dari pemerintah nagari ya, tidak hanya modal yang mereka kasih tetapi pemerintah nagari, ketua adat ingin sekali kalau wisata dan aset-aset nagari ada dalam naungan bumnag”. (Wawancara, 24 April 2024, pukul 14.00 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah nagari merupakan faktor pendukung yang signifikan untuk kemajuan BUMNag. Dukungan tersebut tidak hanya berupa modal, tetapi juga mencakup keinginan pemerintah nagari dan ketua adat untuk mengintegrasikan aset-aset nagari dan potensi wisata ke dalam naungan BUMNag. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pengembangan BUMNag, yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Nagari kedepannya.

#### b. Partisipasi Aktif Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam pengelolaan BUMNag menjadi landasan utama. Masyarakat yang memahami manfaat dari keterlibatan mereka cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. Komunikasi yang efektif antara pengelola BUMNag dan masyarakat juga sangat penting, karena informasi yang jelas dan terbuka mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat untuk memahami aspek-aspek pengelolaan usaha juga

dapat meningkatkan partisipasi mereka. Dengan semua faktor ini, masyarakat tidak hanya merasa memiliki BUMNag, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan BUMNag di Nagari Taram. Hal ini disampaikan oleh Bapak Menek selaku masyarakat:

“kami sebagai masyarakat senang bisa ikut serta mba dalam dalam kegiatan BUMNag. Seperti dalam acara seperti gotong royong atau pertemuan desa. Dan kami sebagai masyarakat senang bisa memberikan ide dan masukan dalam perencanaan kegiatan, karena merasa suara kami didengar mba”. (Wawancara, 29 April 2024, Pukul 15.35 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya peran serta mereka dalam pengelolaan BUMNag, yang didorong oleh harapan untuk melihat perubahan positif di lingkungan mereka. Masyarakat di Nagari Taram tidak hanya merasa memiliki BUMNag, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam keberhasilan dan keberlanjutan usaha tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif bukan hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi juga mencerminkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan nagari.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Faktor Anggaran**

Keberadaan BUMNag dalam melaksanakan program dan usaha tidak dapat dipisahkan dari anggaran yang tersedia. Sebagai lembaga usaha, modal merupakan salah satu faktor penting untuk kelangsungan dan perkembangan BUMNag. Keterbatasan dana usaha akan

berdampak pada kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha tersebut.

BUMNag di masyarakat Nagari Taram kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat berfungsi sebagai alternatif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Ilham selaku Sekretaris BUMNag:

”BUMNag ini tidak bisa memberikan gaji yang layak. Laba dari gas LPG Rp1.200.000-1.300.000 itu laba bersih. Sehingga kalau di gabungan dengan gaji yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Desa itu masih sangat jauh sekali. Dan kami pengelola juga sudah mengusulkan kegiatan usaha yang bisa menambah laba bersih dari bumnag untuk nagari. Dan dengan itu di harapan bisa memberikan gaji yang layak kepada pengelola”. (Wawancara, 23 April 2024, pukul 15.00 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun BUMNag di Nagari Taram memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, tantangan dalam hal laba dan gaji pengelola perlu diatasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Lebih lanjut mengenai untuk faktor penghambat kemajuan BUMNag di nagari taram ini juga disampaikan oleh Bapak Nanang Anwar selaku Wali Nagari menjelaskan:

“Tantangannya dalam operasionalnya kita juga kesulitan. anggaran yang tersedia di nagari untuk menjalankan usaha BUMNag memang ada, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelola BUMNag perlu melakukan terobosan dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan anggaran yang ada”. ( Wawancara, 25 April 2024, pukul 14.35 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat anggaran yang tersedia untuk menjalankan usaha BUMNag, jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan pengembangan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pengelola BUMNag untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan anggaran yang ada. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BUMNag di nagari tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola BUMNag sangat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan operasional usaha. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian pada pengembangan kapasitas pengelola melalui pelatihan, dukungan, dan motivasi yang tepat agar BUMNag dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program BUMNag memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Gusnedi selaku Sekretaris nagari menjelaskan:

“kita juga kesulitan dalam mencari sumber daya manusianya yang mau menjalankan bumnag. Kalau misalnya kami ambil sarjana mereka kurang tertarik karena upah dari kami masih Rp 2.000.0000. kalau kami ambil anak SMA kemampuannya belum ada. Jadi itulah tantangannya”. (Wawancara, 26 April 2024, pukul 15.30 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program BUMNag mengalami kendala salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mencari sumber daya manusia



yang bersedia menjalankan BUMNag. Meskipun ada upaya untuk merekrut sarjana, mereka cenderung kurang tertarik karena imbalan yang ditawarkan masih rendah. Di sisi lain, jika merekrut lulusan SMA, kemampuan yang dimiliki belum memadai untuk mengelola usaha dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya tarik dan imbalan bagi pengelola BUMNag, serta upaya untuk mengembangkan keterampilan masyarakat agar dapat berkontribusi secara efektif dalam program tersebut.

Lebih lanjut mengenai faktor penghambat kemajuan BUMNag dari sumber daya manusia di nagari tarom juga disampaikan oleh Bapak Afrizal selaku Ketua Bamus menjelaskan:

“masalah internalnya seperti sumber daya manusianya. Karena pada saat ini kami dari nagari belum ada melaksanakan pelatihan khusus bagi pengelola, komisaris”. (Wawancara, 26 April 2024, pukul 14.50 WIB)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini, belum ada pelatihan khusus yang dilaksanakan untuk pengelola dan komisaris BUMNag, yang mengakibatkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif. Ketiadaan pelatihan ini menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas pengelola, sehingga mempengaruhi kinerja dan perkembangan BUMNag. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan program pelatihan yang dapat membekali pengelola dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan BUMNag.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada relasi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, interaksi pemerintah nagari dan bumnag, serta Relasi dan interaksi, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Relasi dalam pengelolaan BUMNag di nagari taram melalui proses musyawarah berjalan baik. Di mana dalam pengambilan keputusan melibatkan semua *stakeholder* dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Musyawarah dimulai dengan pengundangan semua pihak untuk hadir dalam pertemuan, di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Dilihat dari mekanisme komunikasi antara pengelola BUMNag dan *stakeholder* lainnya dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, laporan berkala, dan forum diskusi. Namun, dalam membangun relasi yang baik, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini meliputi keterbatasan informasi keuangan, harga pertamax yang cukup tinggi, serta BUMNag belum bisa mengelola wisata kepala banda yang ada di nagari taram.
- b. Interaksi antara pemerintah nagari dan pengelola BUMNag tergolong baik, adanya dukungan dari pemerintah nagari dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan bimbingan teknis. Dukungan ini sangat penting karena untuk memastikan keberhasilan BUMNag. Dengan sinergi yang kuat, BUMNag dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari secara keseluruhan.

- c. Di samping itu terdapat beberapa faktor pendukung antara lain komitmen pemerintah nagari untuk memajukan ekonomi lokal melalui BUMNag, Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMNag. Di sisi lain terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam dalam pengelolaan BUMNag di nagari taram antara lain, faktor anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen bisnis.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Tentang Collaborative Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh karena itu peneliti menyarankan:

- a. Perlu ada forum komunikasi rutin dan pertemuan rutin antara pihak pemerintah nagari pengurus BUMNag, pemerintah nagari, dan masyarakat untuk membahas perkembangan, tantangan, dan rencana ke depan. Pastikan semua informasi terkait pengelolaan BUMNag disampaikan dengan jelas dan terbuka, sehingga semua pihak merasa terlibat dan memiliki akses yang sama terhadap informasi.
- b. Pemerintah nagari sebaiknya terus memperkuat dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan BUMNag, serta menyediakan pendanaan yang memadai untuk proyek-proyek yang berpotensi meningkatkan kinerja BUMNag. Peningkatan Dukungan dari pihak *eksternal* seperti lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan

sektor swasta untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan yang diperlukan dalam pengembangan usaha BUMNag. Untuk memperkuat sinergi, pemerintah nagari juga dapat membentuk forum komunikasi yang melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat, untuk mendiskusikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi BUMNag. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMNag dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari secara keseluruhan.

- c. Untuk mengatasi faktor penghambat terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Disarankan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dengan menganalisis dan mengoptimalkan alokasi dana untuk program-program berdampak langsung, serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Selain itu, penting untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan manajemen bisnis bagi pengurus dan staf BUMNag, serta mempertimbangkan rekrutmen tenaga ahli atau konsultan untuk memberikan bimbingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMNag dapat beroperasi lebih efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Aulia, S. R. (2022). Strengthening The Management Of “Harta Sadesa” Village-Owned Enterprises (VOE) In Katapang Village, Bandung Regency, Through The Collaborative Governance Model. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 176–189. [www.ayobandung.com](http://www.ayobandung.com), diakses 26 Januari 2024.
- Ardiansyah, M., & Aulia, F. (2021). Faktor Penentu Kesejahteraan Subjektif Mahasiswa: Sebuah Studi Eksploratif di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 1661–1668. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1157>, diakses 26 Januari 2024.
- Dwi Phitaloka, R., & Sri Wibawani. (2023). Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1), 8–16. <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9523>, diakses 26 Januari 2024.
- Hidayat, Y., Wismaningtyas, T. A., & Sujatmiko. (2024). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes): Studi pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8619>, diakses 26 Januari 2024.
- Octaviani, V. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.13974>, diakses 26 Januari 2024.
- Puspitasari, C., Sumarjono, Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>, diakses 29 Januari 2025.
- Risa, Y., Fauzi, E., & Cenery, J. P. (2019). Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1657>, diakses 26 Januari 2024.
- Silsabila, S., Fauzi, N., & Rosita, I. (2024). Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 460. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1486>, diakses 8 Januari 2025.
- Subekti, T., & Irma Fitriana Ulfah. (2023). Collaborative Governance Pada Bumdes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 161–174. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2110>, diakses 27 Januari 2024.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari

Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari

Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) “Sato Sakaki

## **PEDOMAN WAWANCARA**

*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

### **A. Identitas Informan**

Nama :

Alamat :

Jabatan :

### **B. Pertanyaan wawancara ini merujuk pada poin-poin yang ada pada fokus penelitian**

#### **1. Relasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari**

- a. Bagaimana proses musyawarah dilakukan dalam pengambilan keputusan di BUMNag?
- b. Bagaimana hubungan antara pengelola BUMNag dan masyarakat setempat?
- c. Apa peran pemerintah nagari dalam mendukung pengelolaan BUMNag?
- d. Bagaimana mekanisme komunikasi antara pengelola BUMNag dan stakeholder lainnya?
- e. Apa tantangan yang dihadapi dalam membangun relasi yang efektif dalam pengelolaan BUMNag?

#### **2. Interaksi antara Pemerintah Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari**

- a. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah nagari kepada bumnag?
- b. Apa saja bentuk interaksi yang dilakukan antara Pemerintah Nagari dan pengelola BUMNag?
- c. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah nagari dan BUMNag dalam merencanakan dan melaksanakan program-program?
- d. Bagaimana peran masing-masing pihak, baik Pemerintah Nagari maupun BUMNag, dalam pengelolaan usaha milik nagari?
- e. Bagaimana Pemerintah Nagari memanfaatkan BUMNag untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal?

3. Faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam pengelolaan di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
  - a. Apa saja faktor-faktor pendukung kemajuan bumrag di Nagari Taram?
  - b. Bagaimana strategi pengurus meningkatkan atau memperbesar faktor pendukung dan menekan faktor penghambat kemajuan bumrag di Nagari Taram?
  - c. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam memajukan bumrag di Nagari Taram?
  - d. Bagaimana strategi pengurus menghadapi kendala tersebut?



## LAMPIRAN

### 1. Penunjukan Dosen Pembimbingan Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Jalan ... Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 501971 - 501775 Fax. (0274) 515080 Yogyakarta 55225

Nomor : 089/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Utami Sulistiana, S.P., M.P

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Martiwi Azzarah Putri
No. Mahasiswa	: 20520011
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Ace Judul	: 18 Oktober 2023
Judul Proposal	: Collaborative Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi kasus di Nagari Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2023  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rijel Samaloisa



## 2. Permohonan Ijin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI SARJANA S1  
• PROGRAM STUDI SARJANA S2  
• PROGRAM STUDI SARJANA S3

• PROGRAM STUDI SARJANA S1  
• PROGRAM STUDI SARJANA S2  
• PROGRAM STUDI SARJANA S3

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 146/IU/2024  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 26 Februari 2024. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Martiwi Azzarah Putri  
No Mhs : 20520011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Collaborative Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat  
Tempat : Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat  
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Ketua  
  
Dr. Sutomo Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190

### 3. Surat Rekomendasi dari Nagari Taram



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN HARAU  
NAGARI TARAM  
JLN.TARAM -BUKIT LIMBUKU TELP. (0752) - 789095**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 400.10.2.2.9/II / TUU / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini memberikan Rekomendasi dan izin kepada :

Nama : **MARTIWI AZZAHRA PUTRI**  
Tempat / Tanggal lahir : Koto Tinggi Maek / 01-03-2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Koto Tinggi Nagari Maek Kec. Bukik Barisan

Untuk melakukan penelitian / penyusunan skripsi :

Judul : **"Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat"**  
Lokasi : Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberituhkan / melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintahan Nagari Taram
5. Apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini di cabut kembali.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Taram, 23 April 2024  
**WALI NAGARI TARAM**  
  
**NANANG ANWAR, SE**



#### 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Nanang Anwar sebagai Wali Nagari Taram



Wawancara bersama Bapak Gusnedy selaku Sekretaris Nagari Taram



Wawancara bersama Bapak Ilham selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sato Sakaki



Wawancara bersama Bapak Afrizal selaku Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Taram